

LAPORAN KINERJA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN



**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2026**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Bogor, 23 Januari 2026

Tim Reviu

Katimker PE BPP Tanah dan Pupuk



Dr. Adha Patmah Siregar, M.Si
NIP. 19811025 200912 2 003

Mengetahui

Kapoksi PPT BRMP SDLP



Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P, M.Sc.
NIP. 197403052005011002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian (BPP Lingkungan Pertanian) Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPP Lingkungan Pertanian selama tahun 2025. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran capaian

kinerja BPP Lingkungan Pertanian selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat informasi tentang organisasi, rencana, dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja. Capaian kinerja kegiatan di BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 secara umum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja pada periode selanjutnya dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan laporan ini. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karena itu kami berharap saran dan masukan dari semua pihak untuk kami jadikan perbaikan maupun peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



Pati, 31 Desember 2025

Kepala Balai,

Dr. Lutfi Izhar, S.P., M.Sc

NIP. 197411281999031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). BPP Lingkungan Pertanian secara teknis dibina oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. BPP Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi: (1) Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian, (2) Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian lingkungan pertanian, (3) Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian lingkungan pertanian, (4) Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia lingkungan pertanian dan penilaian kesesuaian, (5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian, dan (6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

Visi BPP Lingkungan Pertanian mengacu pada visi BRMP yaitu mewujudkan lembaga unggul dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan modern yang inovatif dalam mendukung pertanian maju. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi BPP Lingkungan Pertanian yaitu: (1) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional, (2) Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani, (3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan, (4) Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian, dan (5) Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

Kinerja pada tahun anggaran 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPP Lingkungan Pertanian yang merupakan turunan dari PK BRMP yang terdiri dari 4 (empat) sasaran kinerja yaitu: (1) Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian, (2) Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian, (3) Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan (4) Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran kinerja tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu: (1) Indeks kepuasan layanan pengujian lingkungan pertanian, (2) Jumlah teknologi digital, *smart farming*, dan modern lingkungan

pertanian yang tersedia, (3) Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian; dan (5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian. Untuk mengukur kinerja tersebut ditetapkan empat indikator keberhasilan, yaitu: (1) Sangat berhasil jika capaian >100%, (2) Berhasil jika capaian 80%-100%, (3) Cukup berhasil jika capaian 60%-79%, dan (4) Tidak berhasil jika capaian 0%-59%.

Capaian kinerja BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 merupakan pelaksanaan PK tahun 2025. Pada tahun 2025, BPP Lingkungan Pertanian telah berhasil melaksanakan 4 (empat) sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan. Capaian IKSK1 yaitu Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian adalah sebesar 3,47 dari target 3,2 atau tercapai 108,44% sehingga termasuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian IKSK2 yaitu Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia adalah sebesar 0 teknologi dari target 0 teknologi. Capaian IKSK3 yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian adalah sebesar 86,10 dari target 83,35 atau tercapai 103,30% sehingga termasuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian IKSK4 yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian yaitu 100 dari target 91,00 atau tercapai 109,89% sehingga termasuk dalam kategori sangat berhasil. Dengan demikian, kinerja BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar 107,21% menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.5. Sumber Daya Manusia.....	5
1.6. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	7
1.7. Dukungan Anggaran.....	7
1.8. Tantangan dan Peran Strategis	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. Perencanaan Strategis.....	9
2.2. Visi.....	9
2.3. Misi	9
2.4. Tujuan	9
2.5. Sasaran	10
2.6. Arah Kebijakan.....	10
2.7. Program dan Kegiatan	11
2.8. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	11
2.9. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja TA. 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja TA. 2025	16
3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian Pada TA. 2023, 2024, dan 2025.....	20
3.1.3. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja.....	22
3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja .25	
3.2. Realisasi Anggaran.....	25
3.3. Capaian Kinerja Lainnya	26
3.2.1 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	26

3.2.2 Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian BPP Lingkungan Pertanian	29
a. Sampel Pengujian Laboratorium	29
b. Pelanggan Laboratorium	29
c. Penerimaan PNPB Laboratorium	30
d. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium	31
e. Kalibrasi alat	31
f. Uji Profisiensi	31
g. Kaji Ulang Dokumen	32
3.2.3 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015	32
a. Rapat Koordinasi Tim ISO BPP Lingkungan Pertanian	32
b. Tinjauan Dokumen	33
c. Audit Internal	34
d. Tinjauan Manajemen	34
e. Audit Sertifikasi SNI ISO 9001:2015	36
3.2.4 Keterbukaan Informasi Publik	37
3.2.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	39
3.2.6 Pengelolaan PNPB BPP Lingkungan Pertanian	40
3.2.7 Kegiatan <i>Competitive Grant</i> (CG) Program ICARE	40
3.2.8 Pengelolaan Hibah Luar Negeri	54
PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian	7
Tabel 2. IP2MP BPP Lingkungan Pertanian	7
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian TA. 2025 Awal	12
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025 Revisi 1	12
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025 Revisi 2	13
Tabel 6. Capaian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025	15
Tabel 7. Rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	16
Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IKS1 TA. 2025	16
Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi IKS2 TA. 2025	17
Tabel 10. Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2025 ...	18
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi IKS3 TA. 2025	18
Tabel 12. Nilai IKPA BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025	20
Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKS4 TA. 2025	20
Tabel 14. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPP Lingkungan Pertanian.....	24
Tabel 15. Realisasi Anggaran BPP Lingkungan Pertanian	25
Tabel 16. Capaian Realisasi Program Swasembada Pangan di Kab. Banjarnegara	27
Tabel 17. Capaian Realisasi Program Swasembada Pangan di Kab. Cilacap	27
Tabel 18. Kendala LTT Padi Reguler di Kab Banjarnegara dan Upaya Tindak Lanjutnya	27
Tabel 19. Kendala LTT Padi Reguler di Kab. Cilacap dan Upaya Tindak Lanjutnya	28
Tabel 20. Jumlah sampel laboratorium BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025	29
Tabel 21. Realisasi Setoran PNPB Tahun 2025	30
Tabel 22. Daftar Pelatihan Laboratorium Tahun 2025	31
Tabel 23. Daftar Alat Laboratorium yang Dikalibrasi	31
Tabel 24. Komoditas Uji Profisiensi Tahun 2025	32
Tabel 25. Daftar SOP Baru	34
Tabel 26. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal	34
Tabel 27. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPP Lingkungan Pertanian	38
Tabel 28. Penerimaan PNPB BPP Lingkungan Pertanian	40
Tabel 29. Luasan Demplot Varietas Padi Rendah Emisi	44
Tabel 30. Dosis Rekomendasi Pupuk Hasil Analisa Tanah dengan PUTS	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan BPP Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BRMP	3
Gambar 2. Struktur Organisasi BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025.....	4
Gambar 3. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian	5
Gambar 4. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian Berdasarkan Jabatan .	6
Gambar 5. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 6. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian Berdasarkan Golongan .	7
Gambar 7. Kerangka Logis Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	18
Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2023, 2024, dan 2025	21
Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2023, 2024, dan 2025	21
Gambar 10. Distribusi Pelanggan Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025	30
Gambar 11. Rapat Koordinasi Tim ISO BPP Lingkungan Pertanian.....	33
Gambar 12. Rapat Tinjauan Manajemen BPRMP Lingkungan Pertanian	35
Gambar 13. Audit Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 BPP Lingkungan Pertanian	37
Gambar 14. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BPP Lingkungan Pertanian	37
Gambar 15. Predikat Informatif dan Petugas Terbaik PPID Tahun 2025	38
Gambar 16. Penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah	40
Gambar 17. Bimbingan Teknis “Inovasi Pertanian Ramah Lingkungan melalui Pemanfaatan Biokompos – FABA (<i>Fly Ash Bottom Ash</i>) pada Budidaya Mangga Berkelanjutan di Kab. Pasuruan”	41
Gambar 18. Pelatihan Pembuatan Biochar dari Tongkol Jagung	42
Gambar 19. Denah Lokasi Pelaksanaan Demplot Pertanian Ramah Lingkungan	43
Gambar 20. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis	44
Gambar 21. Kegiatan Pengolahan, Penyemaian, dan Penanaman.....	45
Gambar 22. Pelatihan Pembuatan Kompos Jerami.....	46
Gambar 23. Pendampingan Pembuatan Kompos	46
Gambar 24. Pelatihan Pembuatan Biochar	47
Gambar 25. Pendampingan Pembuatan Biochar	47
Gambar 26. Kondisi Pertanaman Saat Umur 43 HST	48
Gambar 27. Pelatihan Penggunaan Alat PUTS	49
Gambar 28. Kegiatan Pemupukan Tanaman	50
Gambar 29. Pengamatan AWD dengan Alat Pizometer	51

Gambar 30. Pemasangan Alat AWD Otomatis	51
Gambar 31. Hasil Pengamatan AWD Otomatis Pada Lahan Demplot Budidaya Padi Ramah Lingkungan di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes.....	51
Gambar 32. Hasil Pengamatan AWD secara Manual Pada Bulan November 2025 di Lahan Demplot Budidaya Padi Ramah Lingkungan di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes	52
Gambar 33. Pelatihan Praktik Pembuatan Pestisida Nabati di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes	53
Gambar 34. Aplikasi Pestisida Nabati di Lahan Demplot Budidaya Padi Ramah Lingkungan di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes	53
Gambar 35. Rerata Fluks CH ₄ Berbagai Varietas Padi Pada Penerapan Budidaya Padi Ramah Lingkungan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPP Lingkungan Pertanian	57
Lampiran 2. Data Kepegawaian BPP Lingkungan Pertanian	58
Lampiran 3. PK BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025 Awal	61
Lampiran 4. PK BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025 Revisi 1	63
Lampiran 5. PK BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025 Revisi 2	65
Lampiran 6. Manual IKU BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025.....	67
Lampiran 7. Rencana Aksi Tahun 2025.....	72
Lampiran 8. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja.....	74
Lampiran 9. SOP Penyusunan Laporan Kinerja BPP Lingkungan Pertanian	76
Lampiran 10. Nilai IKPA BPP Lingkungan Pertanian per 31 Desember 2025	78
Lampiran 11. Surat Keputusan Penetapan Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Lingkup BPP Tahun 2025	79
Lampiran 12. Surat Keputusan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan Tahun 2025	81



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian nasional menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik yang bersumber dari dinamika global maupun kondisi domestik. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029, permasalahan seperti perubahan iklim, ketidakpastian rantai pasok pangan dunia, pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumber daya lahan dan air, serta tuntutan peningkatan daya saing produk pertanian menuntut adanya transformasi sistem pertanian Indonesia menuju sistem yang lebih modern, adaptif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat penting untuk memastikan tersedianya kelembagaan yang mampu menjembatani hasil riset, inovasi teknologi, dan kebutuhan nyata di tingkat pengguna, khususnya petani dan pelaku usaha pertanian. Selama ini, pengembangan inovasi pertanian masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain fragmentasi kelembagaan riset dan pengembangan, lemahnya integrasi antara penelitian, perakitan teknologi, dan diseminasi, serta terbatasnya percepatan adopsi inovasi di tingkat tapak. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, nilai tambah, dan ketahanan sistem pertanian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga yang secara khusus memiliki mandat strategis untuk mengoordinasikan perakitan, pengujian, pemutakhiran, dan modernisasi teknologi pertanian secara sistematis dan berkelanjutan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah menetapkan pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sebagai salah satu unit organisasi eselon I di bawah Kementerian Pertanian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Pembentukan badan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat arsitektur kelembagaan pertanian nasional agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan pertanian modern, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan arah pembangunan nasional. Lebih lanjut, pembentukan dan kedudukan BRMP kemudian diterjemahkan secara operasional melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menegaskan fungsi, tugas, dan peran strategis BRMP dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi BRMP untuk berperan sebagai *clearing house* inovasi pertanian, penghubung antara pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, serta penggerak utama modernisasi sistem produksi pertanian nasional. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kelembagaan tersebut, ditetapkan pula Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BRMP, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan

perakitan teknologi, pengujian adaptif, validasi inovasi, serta pendampingan penerapan teknologi di berbagai wilayah agroekosistem Indonesia.

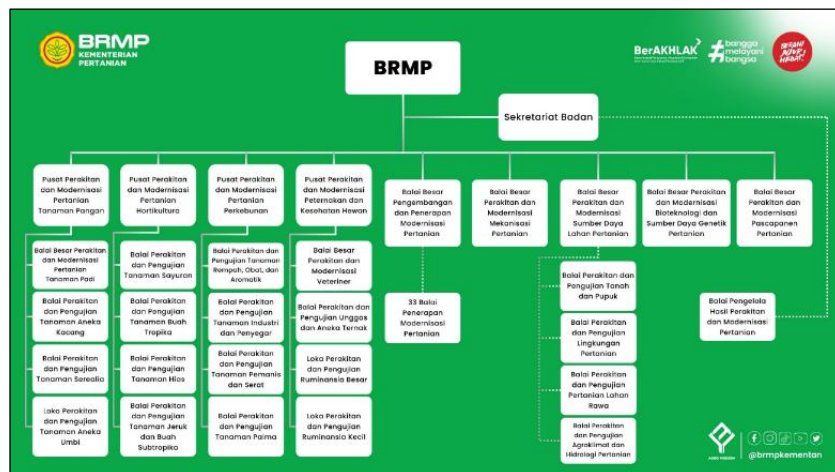
Sesuai Perpres Nomor 192 Tahun 2024, tugas BRMP adalah menyelenggarakan koordinasi, perekayasa, perakitan, pengujian, penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern. Adapun fungsi dari BRMP yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern.
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern.
4. Pelaksanaan administrasi Badan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian (BPP Lingkungan Pertanian) sebagai salah satu UPT lingkup BRMP, mengacu pada Permentan Nomor 10 Tahun 2025 pasal 114 memiliki tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian. Laporan Kinerja BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2025 sebagaimana target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala BPP Lingkungan Pertanian dengan Kepala BRMP. Dalam mencapai target kinerja tersebut, didukung juga dengan beberapa kegiatan meliputi manajemen kelembagaan, ketatausahaan dan sumberdaya pendukung, program kerja dan monitoring evaluasi, dan sistem pengendalian internal (monev-SPI), serta kegiatan penyebarluasan hasil standar dan kegiatan kerjasama. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) DIPA BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025 serta anggaran dari kegiatan kerjasama. Laporan ini disusun secara ringkas, tetapi tidak mengurangi maksud dan tujuan dari masing-masing kegiatan. Laporan rinci dari setiap kegiatan disajikan dalam laporan secara terpisah, yang tertuang dalam laporan akhir masing-masing kegiatan.

1.2. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BPP Lingkungan Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah BRMP dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. BPP Lingkungan Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai. Secara teknis, BPP Lingkungan Pertanian dibina oleh Kepala BBPM SDLP.



Gambar 1. Kedudukan BPP Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BRMP

1.3. Struktur Organisasi

BPP Lingkungan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai (eselon IIIA) yang dibantu oleh 1 (satu) pejabat struktural (eselon IVA), yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup BPP Lingkungan Pertanian. Berdasarkan Kepmentan Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, BPP Lingkungan Pertanian mempunyai 2 (dua) Tim Kerja pada kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas:

1. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi; dan
2. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.

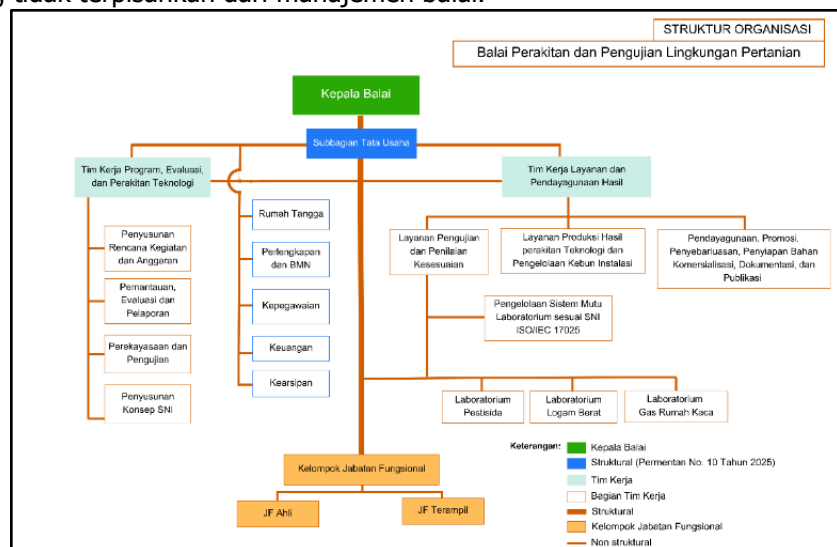
Adapun uraian tugas dari masing-masing Tim Kerja yaitu sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Teknologi melaksanakan: (1) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian; (2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian; (3) perekayasaan dan perakitan teknologi lingkungan pertanian; dan (4) penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang lingkungan pertanian.
2. Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil melaksanakan: (1) layanan pengujian lingkungan pertanian, dan penilaian kesesuaian; (2) layanan produksi hasil perakitan teknologi dan pengelolaan kebun instalasi; dan (3) pendayagunaan, promosi, penyebarluasan, penyiapan bahan komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil perakitan dan pengujian lingkungan pertanian serta pelaksanaan urusan perpustakaan.

Selain Subbag Tata Usaha dan Tim Kerja, juga terdapat beberapa bagian yang diberikan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan Laboratorium Pengujian dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) yaitu sebagai berikut:

1. Manajer Administrasi (MA) Laboratorium yang dirangkap oleh Kasubbag Tata Usaha.
2. Manajer Mutu (MM) Laboratorium yang dirangkap oleh Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil.
3. Manajer Teknis (MT) Laboratorium yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian laboratorium.
4. Deputi MT Laboratorium Gas Rumah Kaca yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian emisi gas rumah kaca (CH_4 , N_2O , dan CO_2).
5. Deputi MT Laboratorium Logam Berat yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian kualitas tanah serta pencemaran logam berat dalam tanah, air (termasuk air permukaan dan air limbah), pupuk organik (baik padat maupun cair), serta produk pertanian/jaringan tanaman.
6. Deputi MT Laboratorium Pestisida yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian mutu pestisida pada produk pestisida, serta residu pestisida pada tanah, air, komoditas kering, komoditas dengan kadar air tinggi, dan komoditas dengan kadar asam tinggi.
7. Manajer IP2MP yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan operasional kebun pengujian.

Sebagai wujud manajemen satu pintu dan untuk memudahkan kontrol, struktur BPP Lingkungan Pertanian melekat dengan laboratorium sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen balai.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025

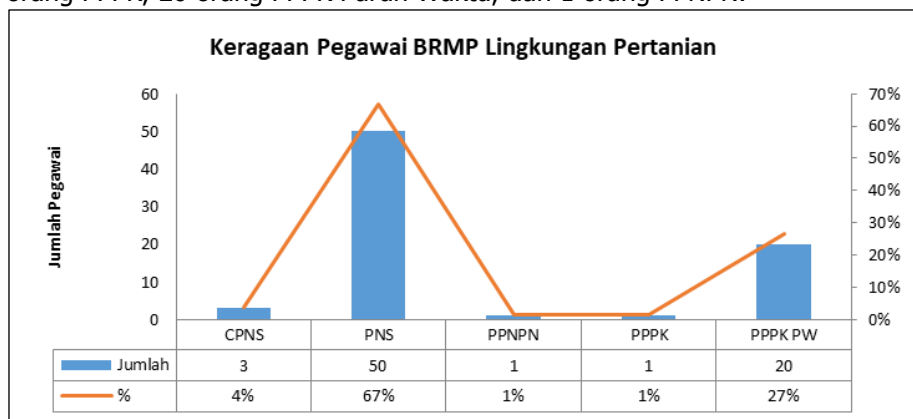
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

BPP Lingkungan Pertanian merupakan salah satu unit kerja di bawah koordinasi BBPM SDLP berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. BPP Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BPP Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian;
2. Pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian lingkungan pertanian Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian.
3. Pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian lingkungan pertanian;
4. Pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia lingkungan pertanian dan penilaian kesesuaian;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

1.5. Sumber Daya Manusia

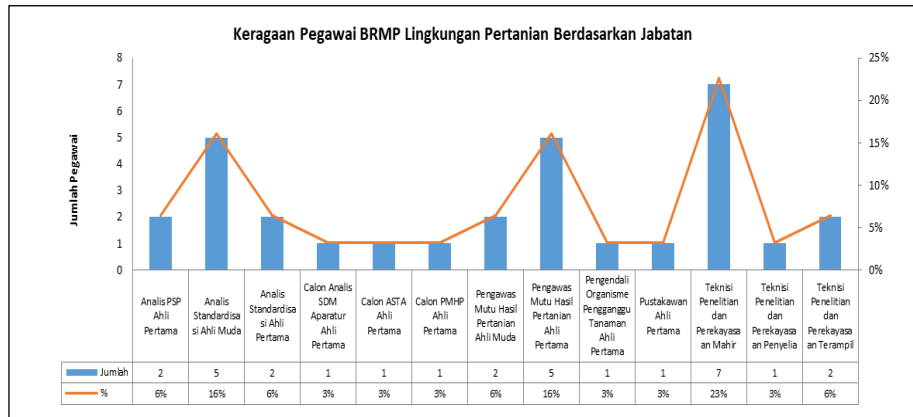
Jumlah pegawai di BPP Lingkungan Pertanian secara keseluruhan per Desember 2025 terdiri dari 75 orang yang terdiri dari 50 orang PNS, 3 orang CPNS, 1 orang PPPK, 20 orang PPPK Paruh Waktu, dan 1 orang PPNP.



Gambar 3. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian

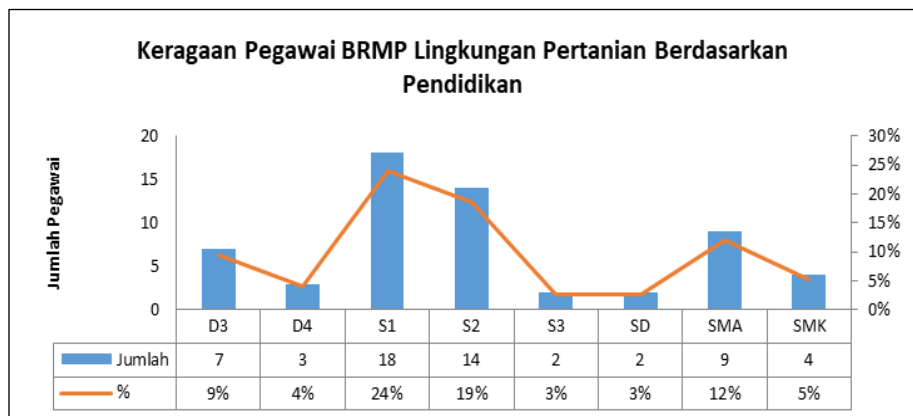
Jumlah pegawai BPP Lingkungan Pertanian berdasarkan jabatan per Desember 2025 terdiri dari 2 orang Analis PSP Ahli Pertama, 5 orang ASTA Ahli Muda, 2 orang ASTA Ahli Pertama, 2 orang PMHP Ahli Muda, 5 orang PMHP Ahli Pertama, 1 orang POPT, 1 orang Pustakawan Ahli Pertama, 1 orang Calon Analis

SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 orang Calon ASTA Ahli Pertama, 1 orang Calon PMHP Ahli Pertama, 7 orang Teknisi Litkayasa Mahir, 1 orang Teknisi Litkayasa Penyelia, dan 2 orang Teknisi Litkayasa Terampil.



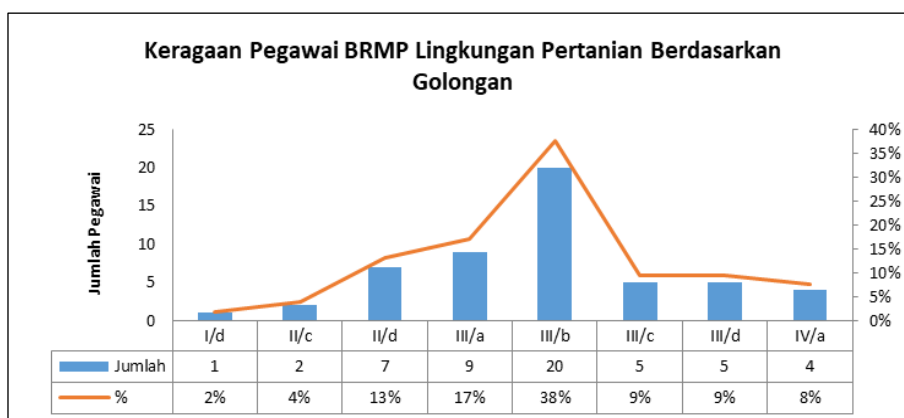
Gambar 4. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai BPP Lingkungan Pertanian berdasarkan pendidikan per Desember 2025 terdiri dari 2 orang S3, 14 orang S2, 18 orang S1, 3 orang D4, 7 orang D3, 25 orang SMA, 4 orang SMK, dan 2 orang SD.



Gambar 5. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BPP Lingkungan Pertanian berdasarkan golongan per Desember 2025 terdiri dari 1 orang golongan I/d, 2 orang golongan II/c, 7 orang golongan II/d, 9 orang golongan III/a, 20 orang golongan III/b, 5 orang golongan III/c, 5 orang golongan III/d, dan 3 orang golongan IV.



Gambar 6. Keragaan Pegawai BPP Lingkungan Pertanian Berdasarkan Golongan

1.6. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPP Lingkungan Pertanian didukung oleh sarana dan prasarana utama meliputi laboratorium dan IP2MP. Laboratorium dimanfaatkan untuk mendukung tugas pengujian dan pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar.

Tabel 1. Daftar Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian

No	Nama	Kemampuan Layanan Pengujian	Status
1	Laboratorium Logam Berat	Kualitas tanah serta pencemaran logam berat dalam tanah, air, pupuk organik, serta produk pertanian /jaringan tanaman	Terakreditasi
2	Laboratorium Pestisida	Mutu pestisida pada produk pestisida, serta residu pestisida pada tanah, air, komoditas kering, komoditas dengan kadar air tinggi, dan komoditas dengan kadar asam tinggi	Terakreditasi
3	Laboratorium Gas Rumah Kaca	Emisi gas CH ₄ , N ₂ O, dan CO ₂	Terakreditasi

Tabel 2. IP2MP BPP Lingkungan Pertanian

No	Nama	Luas (ha)	Pemanfaatan
1	Jakenan	13,80	Tanaman padi, tebu, dan hortikultura

1.7. Dukungan Anggaran

Pada tahun 2025, BPP Lingkungan Pertanian memperoleh anggaran untuk melaksanakan program nilai tambah dan daya saing pertanian, serta program dukungan manajemen sebesar Rp. 8.589.014.000,-. Anggaran tersebut terdiri dari pagu efektif sebesar Rp. 8.079.504.000,- dan pagu blokir sebesar Rp. 509.510.000,-.

1.8. Tantangan dan Peran Strategis

Kementerian Pertanian menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, swasembada pangan ditempatkan sebagai prioritas strategis guna memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Upaya mewujudkan swasembada pangan secara bertahap dan terukur menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan iklim dengan peningkatan kejadian cuaca ekstrem, degradasi dan penurunan kesuburan tanah, keterbatasan sumber daya air, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas dan produktivitas pangan nasional. Di sisi lain, tuntutan terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan semakin meningkat, sehingga diperlukan inovasi teknologi yang adaptif untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, BPP Lingkungan Pertanian memiliki peran strategis melalui pengembangan dan perakitan teknologi lingkungan pertanian yang spesifik lokasi serta adaptif terhadap perubahan iklim. Penguatan sistem pengujian laboratorium yang memenuhi standar SNI ISO/IEC 17025 : 2017 juga menjadi bagian penting untuk menjamin mutu dan validitas data yang dihasilkan. Secara bertahap dan terukur, kontribusi BPP Lingkungan Pertanian pada periode 2025-2029 diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan pertanian, perluasan adopsi teknologi inovatif, serta penguatan tata kelola kinerja yang akuntabel dan berbasis risiko. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, penyuluh, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, BPP Lingkungan Pertanian berkomitmen mendukung pencapaian swasembada pangan nasional yang resilien, berdaya saing, dan berkelanjutan.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Pertanian Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, dan Renstra BPP Tahun 2025-2029. Renstra disusun dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas bagi organisasi dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Secara operasional, penjabaran renstra ini disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan respon *stakeholders*.

2.2. Visi

Visi BPP Lingkungan Pertanian mengacu pada visi BPP yaitu mewujudkan lembaga unggul dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan modern yang inovatif dalam mendukung pertanian maju.

2.3. Misi

Untuk mewujudkan visinya, maka misi BPP Lingkungan Pertanian yaitu:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian; dan
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

2.4. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 yaitu:

1. Merumuskan dan melaksanakan pendampingan penerapan standar sehingga diterapkan oleh pelaku usaha; dan
2. Merakit teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk dimanfaatkan oleh stakeholder untuk meningkatkan produksi.

2.5. Sasaran

Mengacu pada visi, misi, serta arah dan kebijakan strategis, maka sasaran strategis BPP Lingkungan Pertanian yaitu:

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian;
2. Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian;
3. Terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
4. Terkelolanya anggaran badan perakitan dan modernisasi pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

2.6. Arah Kebijakan

Kementerian Pertanian menargetkan tercapainya swasembada pangan secara bertahap dan terukur selama periode 2025-2029, yang tidak hanya mendukung ketahanan nasional tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi rakyat. Pencapaian swasembada pangan tersebut mengacu kepada prioritas nasional 2 yakni: memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Salah satu pilar yang menjadi penopang utama dengan tugas dan fungsi BRMP adalah Pilar ke-6 yakni pemanfaatan teknologi pertanian modern. Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Teknologi modern ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra-tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen.

Pertanian modern dapat mempercepat tercapainya swasembada pangan, Dengan produktivitas yang lebih tinggi dan panen yang lebih stabil, pertanian modern membantu mengurangi kebutuhan impor pangan pokok (beras, kedelai, jagung, dll). Swasembada pangan tidak hanya soal kuantitas, tapi juga keberlanjutan. Teknologi modern memungkinkan praktik pertanian untuk (1) Hemat air dan pupuk, (2) Minim limbah dan dampak lingkungan, (3) tahan iklim ekstrem (melalui varietas tahan kering/hama). Pertanian modern juga berperan penting dalam regenerasi petani. Teknologi membuat pertanian lebih menarik, efisien, dan prospektif bagi petani milenial. Arah kebijakan perekayasaan dan perakitan pertanian modern yaitu dengan memperkuat standardisasi dan penilaian kesesuaian, perekayasaan dan perakitan teknologi untuk peningkatan produktivitas, nilai tambah daya saing, dan kemandirian nasional yang berkelanjutan dan inklusif melalui beberapa strategi melalui strategi:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumberdaya manusia;
2. Membangun fondasi utama pertanian yang efisien, produktif, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil rekayasa teknologi pertanian modern dan fokus pada *output* terapan, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi;

4. Percepatan hilirisasi dan komersialisasi teknologi hasil perekayasa dan perakitan yang berorientasi pasar (*market oriented*);
5. Pembangunan ekosistem inovasi dan jejaring multipihak (*penta helix*). Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas; dan
6. Peningkatan adopsi dan diseminasi teknologi ke sektor riil seperti petani, pelaku usaha (UMKM), maupun industri.

2.7. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 mengacu pada program BBPM SDLP dan BRMP diantaranya berupa program teknis yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian *output* Laporan Hasil Uji Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian *output* yaitu: (1) Koordinasi pendampingan program strategis Kementerian Pertanian, (2) Layanan BMN, (3) Layanan hubungan masyarakat, (4) Layanan umum, (5) Layanan perkantoran, dan (6) Layanan pemantauan dan evaluasi.

2.8. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2025, BPP Lingkungan Pertanian mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan yaitu: (1) meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian, (2) tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian, (3) terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dan (4) terkelolanya anggaran badan perakitan dan modernisasi pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Untuk mengukur capaian tersebut, BPP Lingkungan Pertanian mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu:

1. Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian, diukur dengan 1 (satu) IKSK yaitu Indeks kepuasan layanan pengujian lingkungan pertanian.
2. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian, diukur dengan 2 (dua) IKSK yaitu Jumlah teknologi digital, *smart farming* dan modern lingkungan pertanian yang tersedia, dan Jumlah pelaku usahatani yang memanfaatkan teknologi digital, *smart farming* dan modern lingkungan pertanian.
3. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya birokrasi badan perakitan dan modernisasi pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, diukur dengan 1 (satu) IKSK yaitu Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.
4. Sasaran Kegiatan 4: Terkelolanya anggaran BPP yang akuntabel dan berkualitas, diukur dengan 1 (satu) IKSK yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

2.9. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja TA. 2025

Penyusunan dokumen PK tahun 2025 dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada *output* dan *outcome* untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPP Lingkungan Pertanian berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Berdasarkan dinamika yang terjadi, pelaksanaan kinerja BPP Lingkungan Pertanian yang tertuang dalam bentuk PK telah mengalami beberapa kali revisi sesuai dengan kebijakan dan revisi anggaran BPP Lingkungan Pertanian. PK awal BPP Lingkungan Pertanian ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan pagu DIPA awal sebesar Rp 8.001.025.000,-.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPSI Lingkungan Pertanian TA. 2025 Awal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	- Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	83,35 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87,00 Nilai

Pada tanggal 19 Mei 2025, PK BPP Lingkungan Pertanian mengalami perubahan setelah terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Perubahan PK ini disebabkan adanya Sasaran, Indikator Kinerja, dan Anggaran untuk mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian. Anggaran dalam PK tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.911.025.000,-.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025 Revisi 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Produk Sumberdaya Lahan Pertanian	Jumlah Pengujian Mutu Lingkungan Pertanian Modern	730 Jumlah pengujian
		Jumlah Konsep SNI Lingkungan Pertanian yang Disusun	- RSNI
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian	3,2 Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	83,35 Nilai
3	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	87,00 Nilai

Revisi PK terakhir ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2025. Perubahan ini merevisi Sasaran, Indikator Kinerja, dan Anggaran BPP Lingkungan Pertanian menjadi Rp. 8.589.014.000,-.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025 Revisi 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumberdaya Lahan Pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian	3,2 Indeks
2	Tersedianya Teknologi Sumberdaya Lahan Pertanian	Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia	- Teknologi
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	83,35 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	91,00 Nilai



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja tahun anggaran 2025. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap IKS. Hasil pengukuran kinerja memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.

Keberhasilan pencapaian seluruh IKS BPP Lingkungan Pertanian diukur melalui *maximize* target sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pengukuran *maximize* target jika hasilnya dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. *Maximize* target dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja ditetapkan berdasarkan empat kategori keberhasilan, yaitu:

- 1) Sangat berhasil jika capaian >100%
- 2) Berhasil jika capaian 80-100%
- 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%
- 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%

Capaian IKS BPP Lingkungan Pertanian dihitung menggunakan rumus berikut:

1. IKS1: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian

Penilaian dihasilkan dari pengolahan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan selama tahun berjalan

2. IKS2: Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia

Penilaian dilakukan dengan mengukur jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern lingkungan pertanian yang tersedia

3. IKS3: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPP Lingkungan Pertanian

Penilaian dihasilkan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi dalam rangka penetapan Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM, baik secara mandiri lingkup BPP maupun oleh Tim Inspektorat Investigasi, Itjen Kementan

4. IKS4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPP Lingkungan Pertanian

Penilaian dihasilkan dari pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja berdasarkan data realisasi dan kepatuhan pengelolaan anggaran yang tercatat dalam sistem Kementerian Keuangan.

Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dari 4 (empat) IKS BPP Lingkungan Pertanian, seluruhnya telah tercapai dengan rata-rata persentase ketercapaian 107,56% menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian adalah 3,47 dari target 3,20 atau tercapai 108,44% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS2 Jumlah Teknologi Digital, Smart Farming dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia adalah 0 dari target 0. Capaian IKS3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPP Lingkungan Pertanian adalah 86,10 dari target 83,35 atau tercapai 103,30% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKS 4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPP Instrumen Lingkungan Pertanian adalah 100,00 dari target 91,00 atau tercapai 109,89% dengan kategori sangat berhasil.

Tabel 6. Capaian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumberdaya Lahan Pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian	3,20 Indeks	3,47 Indeks	100,44	Sangat berhasil
2	Tersedianya Teknologi Sumberdaya Lahan Pertanian	Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia	- Teknologi	- Teknologi	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	83,35 Nilai	86,10 Nilai	103,30	Sangat berhasil
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	91,00 Nilai	100,00 Nilai	109,89	Sangat berhasil

3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja TA. 2025

a. IKSK1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian

Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap mutu layanan pengujian lingkungan pertanian yang diberikan. Indeks ini disusun berdasarkan penilaian pengguna layanan terhadap aspek-aspek pelayanan, seperti kejelasan prosedur, ketepatan waktu, kompetensi petugas, keakuratan hasil pengujian, serta sarana dan prasarana pendukung, sehingga menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Nilai Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian diperoleh dari penilaian Survei Kepuasan Masyarakat terhadap sembilan unsur pelayanan yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 7. Rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Uraian	Unsur								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Total ilai	1828	1815	1791	1842	1812	1842	1865	1835	1914
NRR	3,49	3,46	3,42	3,52	3,46	3,52	3,56	3,50	3,65
NRR tertimbang	0,38	0,38	0,38	0,39	0,38	0,39	0,39	0,39	0,40
NRR per unsur	27,25	27,05	26,69	27,45	27,01	27,45	27,80	27,35	28,53
Nilai survei	3,47								
SKM unit layanan	86,82								
Mutu layanan	B								
Kinerja	Baik								

Keterangan:

U1-U9 : unsur-unsur pelayanan

NRR : Nilai rata-rata

NRR tertimbang : NRR per unsur x 0,11 per unsur

NRR per unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuisisioner yang terisi

Pada tahun 2025, target IKSK1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian adalah 3,20. Capaian IKSK1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian tercapai 3,47 atau sebesar 108,44% dari target 3,20 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pengujian lingkungan pertanian yang diberikan oleh BPP Lingkungan Pertanian telah melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan peningkatan kepuasan pengguna layanan serta efektivitas pelaksanaan standar pelayanan yang diterapkan secara optimal.

Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IKSK1 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian	3,2 Indeks	3,47 Indeks	108,44	Sangat berhasil

b. IKS2 Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia

Capaian IKS2 Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern Lingkungan Pertanian yang tersedia di BPP Lingkungan Pertanian pada tahun 2025 belum dapat tercapai. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk pengembangan, pengadaan, dan implementasi teknologi digital, *smart farming*, dan pertanian modern. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada belum terlaksananya kegiatan inovasi dan modernisasi lingkungan pertanian sebagaimana yang telah direncanakan, sehingga capaian indikator kinerja belum dapat direalisasikan secara optimal.

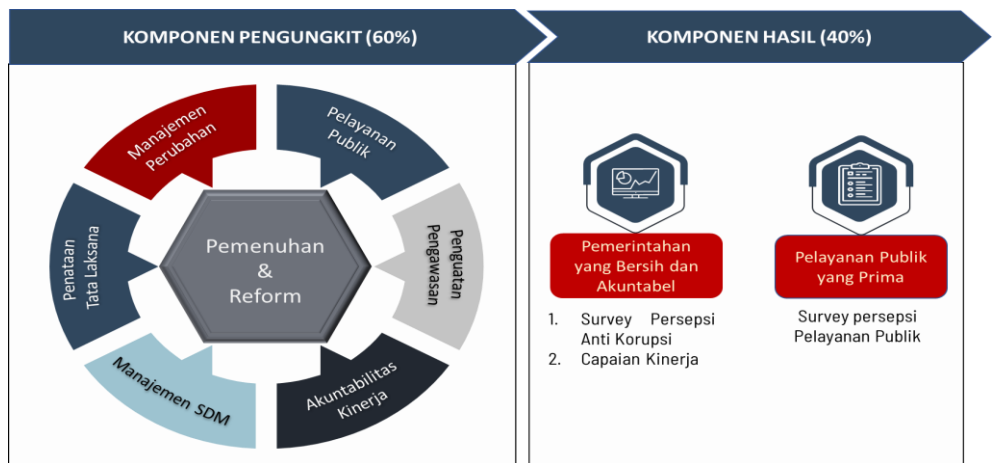
Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi IKS2 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> , dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia	- Teknologi	- Teknologi	-	-

c. IKS3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPP Lingkungan Pertanian

Penilaian ZI bertujuan untuk mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi melalui penguatan reformasi birokrasi, penanaman budaya integritas, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, sehingga unit kerja memiliki komitmen nyata dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta siap meraih predikat WBK/WBBM. Penilaian ZI mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penilaian ZI mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana *stakeholder* merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.

Melalui kerangka logis Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pada area pengungkit terdiri dari dua aspek, yaitu pemenuhan dan reform. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.



Gambar 7. Kerangka Logis Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Pada tahun 2025, target IKS3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBK pada BPP Lingkungan Pertanian adalah 83,35. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tim asesor, nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada BPP Lingkungan Pertanian adalah sebesar 86,10.

Tabel 10. Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2025

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM							
Area Perubahan		Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A PENGUNGKIT		60,00					
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,18	3,67	6,85	85,65%	OK
	2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	3,50	2,34	5,84	83,36%	OK
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,31	4,25	8,56	85,62%	OK
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	3,44	5,00	8,44	84,39%	OK
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,50	6,50	13,00	86,68%	OK
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,46	3,97	7,43	74,32%	OK
TOTAL PENGUNGKIT					50,12	83,54%	OK
B HASIL		40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50			20,75	92,22%	OK
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			15,75	90,00%	OK
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			5,00	100,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50			15,23	87,00%	
	- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			15,23	87,00%	OK
TOTAL HASIL					35,98	89,94%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI					86,10		OK

Capaian IKS3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada BPP Lingkungan Pertanian tercapai 103,30% dari target 83,35 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi IKS3 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPP Lingkungan Pertanian	83,35 Nilai	86,10 Nilai	103,30	Sangat berhasil

d. IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPP Lingkungan Pertanian

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian ini berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Pada tahun 2025 telah diimplementasikan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output*, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Penilaian IKPA meliputi 3 aspek pengukuran dan 8 indikator kinerja, yaitu:

- a. Aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 2 indikator: (1) Revisi DIPA dan (2) Deviasi halaman III DIPA;
- b. Aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari 5 indikator: (1) Penyerapan anggaran, (2) belanja kontraktual, (3) Penyelesaian tagihan, (4) Pengelolaan Uang Persediaan dan tambahan uang persediaan (UP dan TUP); dan (5) Dispensasi surat perintah membayar (SPM); serta
- c. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dengan 1 indikator: (1) Capaian *output*.

Pada pelaksanaannya, nilai kinerja anggaran dihitung secara otomatis dengan menginput data perencanaan pelaksanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran yang dilakukan per hari, bulanan maupun triwulan ke dalam aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Nilai IKPA BPP Lingkungan Pertanian pada tahun 2025 berdasarkan aplikasi MONEVAPA (OMSPAN) adalah sebesar 100,00 yang terdiri dari (1) Revisi DIPA sebesar 100,00 dengan bobot 10, (2) Deviasi halaman III DIPA sebesar 100,00 dengan bobot 15, (3) Penyerapan anggaran sebesar 100,00 dengan bobot 20, (4) Belanja kontraktual sebesar 100,00 dengan bobot 10, (5) Penyelesaian tagihan sebesar 100,00 dengan bobot 10, (6) Pengelolaan UP dan TUP sebesar 100,00 dengan bobot 10, (7) Dispensasi SPM sebesar 0,00 dan (8) Capaian *output* sebesar 100,00 dengan bobot 25.

Tabel 12. Nilai IKPA BPP Lingkungan Pertanian TA. 2025

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Sampai Dengan : DESEMBER													
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sather	Uraian Sather	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
1	050	018	450856	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	100.00						100.00	
2	139	018	633961	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	100.00						100.00	
3	097	018	237380	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	100.00						100.00	
4	032	018	411993	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACAING	Nilai	100.00	100.00	99.88	0.00	0.00	100.00	100.00	79.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.98	0.00	0.00	10.00	25.00	
					Nilai Aspek	100.00						99.94	
5	023	018	025227	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.31	100.00	79.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25	
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00	
					Nilai Aspek	100.00						99.16	

hal : 1 dari 11 halaman

tanggal cetak : 06-01-26 23:18:49 oleh : E01809

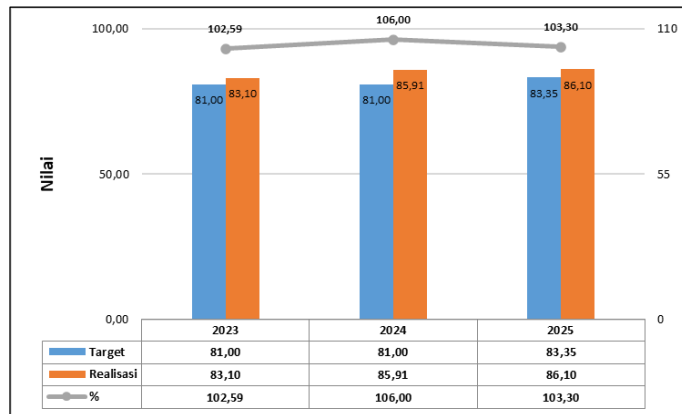
Capaian IKS4 Nilai IKPA BPP Lingkungan Pertanian yang diperoleh tercapai 109,89% dari target sebesar 91,00 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil.

Tabel 13. Perbandingan Target dan Realisasi IKS4 TA. 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Kategori
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPP Lingkungan Pertanian	91,00 Nilai	100,00 Nilai	109,89	Sangat berhasil

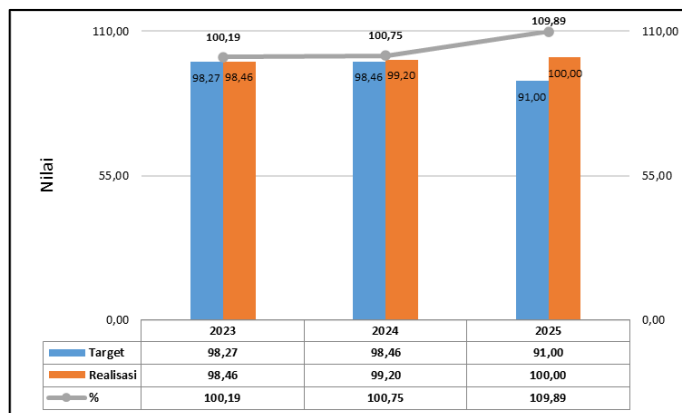
3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian Pada TA. 2023, 2024, dan 2025

Sasaran dan indikator kinerja BPP Lingkungan Pertanian disusun sesuai dengan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Indikator kinerja pada program/kegiatan teknis BPP Lingkungan Pertanian pada tahun 2025 diantaranya yaitu: (1) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian, (2) Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia, (3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian, dan (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.



Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2023, 2024, dan 2025

Pada tahun 2023, target Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ditetapkan sebesar 81,00 dan terealisasi sebesar 83,10 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,59%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan mampu melebihi target yang direncanakan. Selanjutnya pada tahun 2024, target tetap berada pada angka 81,00 namun realisasi meningkat signifikan menjadi 85,91. Persentase capaian pada tahun ini mencapai 106,00%, yang merupakan capaian tertinggi selama periode tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan peningkatan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2025, target mengalami peningkatan menjadi 83,35, dengan realisasi sebesar 86,10. Persentase capaian tercatat sebesar 103,30%, yang menunjukkan bahwa meskipun target lebih tinggi, realisasi tetap mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada periode tahun 2023-2025 menunjukkan hasil yang konsisten dan optimal, dimana realisasi setiap tahun selalu menunjukkan hasil yang melampaui dari target yang telah ditetapkan, serta menunjukkan tren capaian yang stabil di atas 100%.



Gambar 9. Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2023, 2024, dan 2025

Pada tahun 2023, target Nilai IKPA ditetapkan sebesar 98,27 dan terealisasi sebesar 98,46 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 102,46%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan optimal. Selanjutnya pada tahun 2024, target Nilai IKPA meningkat menjadi 98,46 dengan realisasi sebesar 99,20. Persentase capaian kinerja tercatat sebesar 100,81%, yang menunjukkan peningkatan capaian kinerja dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran pada level yang sangat baik. Pada tahun 2025, meskipun target Nilai IKPA menurun menjadi 91,00 namun realisasi justru meningkat signifikan sebesar 100,00 dengan capaian kinerja sebesar 109,89% yang merupakan capaian tertinggi selama tiga tahun.

Secara keseluruhan, nilai IKPA selama tiga tahun tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten melampaui target yang ditetapkan, serta menunjukkan adanya peningkatan efektivitas serta kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran.

3.1.3. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun kinerja pertama BPP Lingkungan Pertanian sebagai lembaga yang memiliki tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Hasil pengukuran capaian terhadap PK yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa secara umum kinerja BPP Lingkungan Pertanian tahun 2025 dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BPP Lingkungan Pertanian pada tahun 2025 yaitu:

1. Penyusunan program, rencana kerja/RKAKL/DIPA yang baik dengan mengakomodasi kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target sasaran kegiatan BPP Lingkungan Pertanian sebagaimana tercantum dalam PK 2025.
2. Persiapan pelaksanaan program/kegiatan yang matang dan melakukan analisis resiko pada semua kegiatan untuk mengantisipasi peluang-peluang hambatan yang mungkin dapat mengganggu operasional pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi yang intensif antara BPP Lingkungan Pertanian dengan eselon II di atasnya yaitu BBPM SDLP dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan target dan *timeline* yang telah ditentukan.
4. Implementasi kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan, dan hal ini dipantau dan dievaluasi melalui laporan berkala yang disusun secara bulanan, triwulanan, dan semester.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana yang tepat dan melakukan upaya peningkatan untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian *output* kinerja.
6. Penguatan kerja sama dengan *stakeholder* terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung tercapainya *output*.
7. Peningkatan kapasitas SDM BPP Lingkungan Pertanian melalui kegiatan pelatihan *in house training*, study banding, maupun pelatihan lainnya.
8. Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko Indeks.

3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan berdasarkan data capaian *output* dan realisasi anggaran yang tercatat dalam aplikasi Monev Kemenkeu. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai target *output* yang ditetapkan, dengan tingkat serapan yang terkendali serta deviasi yang minimal antara perencanaan dan realisasi. Perbandingan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran mencerminkan tingkat efisiensi yang baik, dimana *output* strategis dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya.

Tabel 14. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPP Lingkungan Pertanian

No.	RO	Target RO	Realisasi RO	% Capaian	SBK (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp.)	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	Layanan BMN	1	1	100	480.000.000	9.999.000	470.001.000	97,92	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	1	100	458.000.000	30.481.835	427.518.165	93,34	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100	240.000.000	7.294.225	232.705.775	96,96	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU

3.1.5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang diwujudkan dalam kegiatan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian telah berhasil dicapai sesuai dengan target kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan. Kegiatan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian dengan capaian kinerja berupa Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian sebesar 3,47 atau 108,44% dari target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Program Dukungan Manajemen diimplementasikan dalam bentuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen untuk menunjang target PK berupa Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BPP Lingkungan Pertanian dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPP Lingkungan Pertanian. Nilai Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BPP Lingkungan Pertanian telah tercapai sebesar 86,10 dari target 83,35 atau tercapai sebesar 103,30% dari target yang telah ditentukan. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPP Lingkungan Pertanian telah tercapai dengan nilai 100,00 dari target 91,00 atau tercapai sebesar 109,89%.

Secara umum pelaksanaan seluruh program/kegiatan telah mendukung keberhasilan pencapaian kinerja BPP Lingkungan Pertanian pada tahun 2025 yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diperlukan berbagai upaya konstruktif berkelanjutan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja BPP Lingkungan Pertanian di masa yang akan datang.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan dinamika yang terjadi, anggaran BPP Lingkungan Pertanian telah mengalami beberapa kali revisi. Pagu DIPA awal BPP Lingkungan Pertanian yaitu sebesar Rp 8.001.025.000,-, kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp. 8.911.025.000,-, dan revisi terakhir menjadi sebesar Rp. 8.589.014.000,-.

Anggaran yang dikelola BPP Lingkungan Pertanian untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan adalah total sebesar Rp. 8.589.014.000,-. Namun, terdapat pagu blokir sebesar Rp. 509.510.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp. 8.079.504.000,- Realisasi anggaran BPP Lingkungan Pertanian per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 8.049.865.034,- atau sebesar 99,63% berdasarkan pagu efektif. Realisasi anggaran BPP Lingkungan Pertanian berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 3.766.703.000,- dari pagu efektif Rp. 3.796.028.000,- atau 99,23% dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.283.162.000,- dari pagu efektif Rp. 4.283.476.000,- atau 100,00%.

Tabel 15. Realisasi Anggaran BPP Lingkungan Pertanian

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp. 000)	Pagu Blokir (Rp. 000)	Pagu Efektif (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Pegawai	3.796.028	-	3.796.028	3.766.703	99,23
2	Barang dan Jasa	4.729.986	509.510	4.283.476	4.283.162	99,97
3	Modal	-	-	-	-	
Total		8.589.014	509.510	8.079.504	8.049.865	93,72

3.3. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Pemerintah telah menetapkan tujuh belas program prioritas 2024 hingga 2029 yang salah satunya adalah mencapai swasembada pangan, energi dan air yang mendukung Asta Cita Presiden yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kementerian Pertanian menindaklanjuti program prioritas tersebut dengan melaksanakan program strategis swasembada pangan nasional dengan melaksanakan cetak sawah 3 juta Ha, Optimalisasi Lahan, Pompanisasi, Penggunaan Benih Unggul, Keterlibatan Petani Milenial, transformasi pertanian modern dan beberapa program lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 109/Kpts./PW020/M/03/2025 yang kemudian direvisi dengan Kepmentan Nomor 458/Kpts/PW.020/M/06/2025 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan Swasembada Pangan, BPP Lingkungan Pertanian ditunjuk sebagai satuan tugas (satgas) swasembada pangan yang bertanggung jawab pada kegiatan swasembada pangan di wilayah Kab. Banjarnegara dan Kab. Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Tugas tersebut meliputi pendampingan pada kegiatan Optimalisasi Lahan/Cetak Sawah Rakyat (CSR), Brigade Pangan (BP), Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler dan Padi gogo.

Kegiatan pendampingan program swasembada pangan dilakukan melalui empat langkah strategis yaitu: (1) Koordinasi dengan stakeholder terkait, (2) melaksanakan kegiatan pendampingan optimalisasi lahan, pertambahan areal tanam, padi gogo dan brigade pangan untuk peningkatan produksi padi dan luas tanam, (3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan optimalisasi lahan, pertambahan areal tanam, padi gogo dan BP, dan (4) melakukan pelaporan data melalui aplikasi Laporan Utama Kementerian Pertanian yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pelaksana kegiatan pendampingan swasembada melibatkan tim satgas swasembada pangan dan seluruh pegawai BPP Lingkungan Pertanian.

Kegiatan pendampingan program swasembada pangan yang dilaksanakan BPP Lingkungan Pertanian di Kab. Banjarnegara dan Cilacap meliputi (1) pendampingan realisasi LTT padi reguler, (2) oplah non rawa, (3) BP, dan (4) Padi Gogo sesuai target nasional yang ditetapkan didalam Kepmentan nomor 109/Kpts./PW020/M/03/2025 yang kemudian direvisi dengan Kepmentan nomor 458/Kpts/PW.020/M/06/2025. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan (1) koordinasi dengan berbagai pihak terkait, yaitu Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan (HHTP) selaku PJ Swasembada Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Penilaian capaian kinerja program swasembada pangan berdasarkan persentase realisasi terhadap target yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

- Kategori merah : realisasi $\leq 50\%$ dari target
- Kategori kuning : realisasi $50\%-85\%$ dari target
- Kategori hijau : realisasi $\geq 85\%$ dari target

Capaian realiasi kinerja program swasembada pangan di Kab. Banjarnegara dan Kab. Cilacap tercapai dengan kategori hijau, dimana presentase capaian realisasi masing-masing program kegiatan swasembada pangan $\geq 85\%$.

Tabel 16. Capaian Realisasi Program Swasembada Pangan di Kab. Banjarnegara

No	Program kegiatan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Capaian Kinerja (%)
1	LTT padi reguler	27.719	27.236	98
2	Oplah non rawa	750	750	100
3	BP	4	4	100
4	Padi gogo	50	120	240

Tabel 17. Capaian Realisasi Program Swasembada Pangan di Kab. Cilacap

No	Program kegiatan	Target (ha)	Realisasi (ha)	Capaian Kinerja (%)
1	LTT padi reguler	151.955	144.730	95
2	Oplah non rawa	4.003	4.003	100
3	BP	20	22	110
4	Padi gogo	570	672	117,89

Tabel 18. Kendala LTT Padi Reguler di Kab Banjarnegara dan Upaya Tindak Lanjutnya

Kendala	Lahan sawah terdampak	Upaya tindak lanjut	Hasil
Kerusakan Bendung Clangap di Kec. Banjarmangu	475 ha lahan sawah di Kec. Banjarmangu, Wanadadi dan Madukara	BPP Lingkungan Pertanian telah berkoordinasi dengan BBWS Serayu Opak (BBWS SO) untuk percepatan perbaikan	BBWS SO telah mendatangkan alat berat untuk membendung sementara. Perbaikan permanen akan dilaksanakan TA 2026
Pendangkalan Sungai Brukah di Kec. Kalibening	295 ha	BPP Lingkungan Pertanian bersurat ke BBWS SO terkait pengajuan normalisasi sungai	Sungai Brukah telah dinormalisasi oleh BBWS SO pada bulan Oktober 2025
Kerusakan Tanggul irigasi Siwuluh di Kec. Banjarnegara	1.807 ha	BPP Lingkungan Pertanian berkoordinasi dengan Dinas PU dan BBWS SO agar segera diperbaiki	Tanggul irigasi Siwuluh telah diperbaiki pada bulan November dan selesai pada minggu III Desember

Tabel 19. Kendala LTT Padi Reguler di Kab. Cilacap dan Upaya Tindak Lanjutnya

Kendala	Lahan sawah terdampak	Upaya tindak lanjut	Hasil
Pendangkalan di beberapa sungai di wilayah Kec. Kroya, Nusawungu dan Kawunganten	2.094 ha lahan sawah terendam banjir pada MT I sehingga tidak bisa tanam	BPP Lingkungan Pertanian bersurat ke BBWS SO terkait pengajuan normalisasi sungai	BBWS SO telah menjawab bahwa saat ini tidak memungkinkan untuk normalisasi. Normalisasi akan dilaksanakan TA 2026
Naiknya permukaan air laut di wilayah Cilacap bagian barat	4.627 ha lahan sawah terkontaminasi air asin meliputi Kec. Bantarsari, Kampung Laut, Patimuan, dan Gandrungmangu	BPP Lingkungan Pertanian telah memberikan rekomendasi untuk rehabilitasi lahan melalui kegiatan optimalisasi lahan serta updating data LBS oleh Dinas Pertanian	Kegiatan Oplah diprioritaskan di wilayah Cilacap bagian barat yaitu Kec. Bantarsari 6 titik seluas 420 ha, Kec. Kampunglaut seluas 190 ha, Kec. Patimuan 11 titik seluas 350 ha, Kec Gandrungmangu 7 titik seluas 1.130 ha. Dinas Pertanian juga telah mengajukan update data LBS

Kegiatan pendampingan swasembada pangan dilakukan dengan pengawasan capaian realisasi target, monitoring pelaksanaan kegiatan, pendampingan langsung di lokasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selama kegiatan pendampingan, BPP Lingkungan Pertanian melakukan upaya agar seluruh target dapat tercapai 100% namun demikian, ada beberapa kendala yang diluar kendali seperti bencana alam sehingga target tidak tercapai 100%. Hal ini terjadi pada realisasi LTT padi reguler di Kab. Banjarnegara dan Kab. Cilacap yang tidak sesuai dengan target nasional dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya pendangkalan sungai dan kerusakan jaringan irigasi yang berdampak pada terhambatnya jadwal tanam padi akibat banjir maupun kekeringan akibat ketidaktersedianya air selama proses perbaikan jaringan irigasi. Upaya tindak lanjut telah dilakukan oleh BPP Lingkungan Pertanian untuk mengatasi kendala yang dihadapi sehingga kegiatan tanam padi bisa dilakukan oleh petani mendukung realisasi capaian LTT padi reguler.

Program swasembada pangan sangat penting untuk kedaulatan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat, karena menjamin ketersediaan pangan cukup, mengurangi ketergantungan pada impor, melindungi dari gejolak harga global, menghemat devisa, meningkatkan pendapatan petani, dan mendorong ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Dengan tercapainya swasembada pangan maka fondasi kuat suatu negara untuk membangun bangsa yang mandiri, sejahtera, dan tangguh akan tercipta. Negara akan mampu menjamin kecukupan pangan nasional tetapi juga dalam stabilitas ekonomi dan kedaulatan bangsa.

3.2.2 Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian BPP Lingkungan Pertanian

Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 2011 dan memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan layanan pengujian baik untuk kebutuhan internal institusi maupun bagi konsumen eksternal. BPP Lingkungan Pertanian memiliki 3 (tiga) Laboratorium Pengujian yang dikoordinasikan dalam satu unit Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian Lingkungan Pertanian, terdiri dari Laboratorium Logam Berat, Laboratorium Pestisida, dan Laboratorium GRK.

a. Sampel Pengujian Laboratorium

Pada tahun 2025, jumlah sampel yang diujikan di laboratorium BPP Lingkungan Pertanian sebanyak 29.805 sampel dan telah menerbitkan 198 lembar hasil pengujian (LHP). Laboratorium GRK menjadi unit dengan penerimaan sampel tertinggi, yaitu sebanyak 28.137 sampel atau sebesar 94,40% dari total sampel. Selanjutnya, Laboratorium Logam Berat mengujikan 1.620 sampel (5,43%), sedangkan Laboratorium Pestisida mengujikan 48 sampel (0,16%). Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sampel, terutama pada Laboratorium GRK, jika dibandingkan dengan tahun 2024. Sebaliknya, jumlah sampel pada Laboratorium Logam Berat dan Pestisida mengalami penurunan. Penurunan tersebut diduga dipengaruhi oleh penutupan layanan pengujian selama 5 bulan akibat pemblokiran anggaran serta persaingan dengan laboratorium lain di wilayah sekitar.

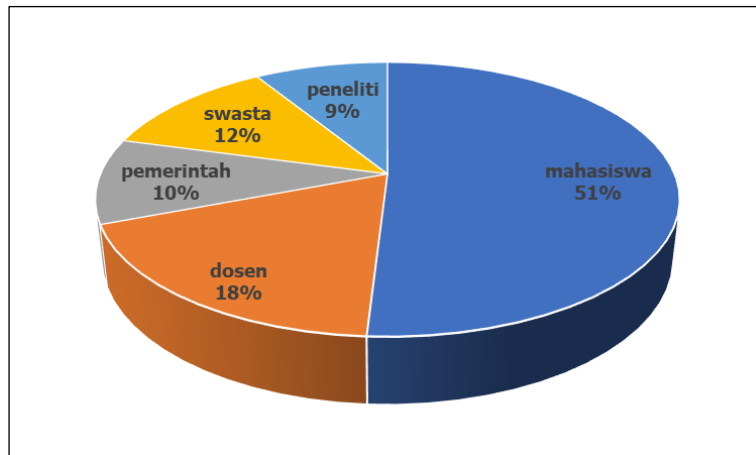
Tabel 20. Jumlah sampel laboratorium BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025

Bulan	Jumlah sampel			Jumlah
	Laboratorium GRK	Laboratorium Logam Berat	Laboratorium Pestisida	
Januari	6.686	0	0	6.686
Februari	1.943	0	0	1.943
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0
Juni	4.272	101	1	4.374
Juli	4.597	447	32	5.076
Agustus	1.402	195	1	1.598
September	1.453	301	2	1.756
Oktober	2.616	192	3	2.811
November	1.954	388	9	2.351
Desember	3.214	26	0	3.240
Total	28.137	1.620	48	29.805

b. Pelanggan Laboratorium

Jumlah pelanggan Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian pada tahun 2025 sebanyak 159 orang. Kelompok pelanggan terbanyak berasal dari mahasiswa (81 orang), diikuti oleh dosen (29 orang), instansi pemerintah (16 orang), pihak swasta

(19 orang), dan peneliti (14 orang). Data ini menunjukkan bahwa laboratorium BPP diminati terutama oleh kalangan akademisi, sekaligus dimanfaatkan oleh sektor swasta dan instansi pemerintah, termasuk pengguna dari luar negeri.



Gambar 10. Distribusi Pelanggan Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025

c. Penerimaan PNBP Laboratorium

Realisasi PNBP laboratorium BPP Lingkungan tahun 2025 sebesar Rp 558.160.000,- atau telah mencapai 107,64% dari target tahun 2025 sebesar Rp 518.539.600,-. Pada bulan Maret dan April 2025 tidak terdapat penerimaan PNBP karena adanya penghentian sementara layanan pengujian akibat pemblokiran anggaran.

Tabel 21. Realisasi Setoran PNBP Tahun 2025

No	Bulan	Penerimaan PNBP (Rp.)
1	Januari	59.518.000,-
2	Februari	32.536.000,-
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	4.230.000,-
6	Juni	50.700.000,-
7	Juli	136.002.000,-
8	Agustus	68.880.000,-
9	September	78.807.500,-
10	Oktober	63.358.500,-
11	November	64.128.000,-
12	Desember	0
Total		558.160.000,-

d. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan wawasan SDM, beberapa tim Laboratorium BPP Lingkungan Pertanian mengikuti kegiatan pelatihan/ *workshop* yang diselenggarakan oleh beberapa instansi/lembaga terkait. Namun, karena adanya keterbatasan anggaran, pelatihan belum dapat dilaksanakan untuk seluruh personel laboratorium.

Tabel 22. Daftar Pelatihan Laboratorium Tahun 2025

No	Pelatihan/ <i>Workshop</i>	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1	Workshop Uji Profisiensi 2025	Kementerian Perdagangan	28 Mei 2025	Afrida Fatkhiatul, S.Pt., M.Si
2	Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)	14-16 Oktober 2025	1. Afrida Fatkhiatul, S.Pt., M.Si 2. Titi Sopiawati, S.P.
3	Bimbingan Teknis Sampling Air	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan (Pusarpedal)	6-14 Oktober 2025	1. Fitra Purnariyanto, A.Md.K 2. Baiq Nunung Sulastri, M.Si

e. Kalibrasi alat

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, kegiatan kalibrasi merupakan tindakan berkala yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh instrumen yang digunakan berfungsi sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Kalibrasi dilakukan guna menjamin keakuratan, ketertelusuran, dan keandalan data yang dihasilkan pada setiap proses pengujian. Pada tahun 2025 ini telah dilakukan kalibrasi terhadap 23 unit alat laboratorium.

Tabel 23. Daftar Alat Laboratorium yang Dikalibrasi

No	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah (unit)
1	Timbangan Analitik	Ohaus	3
2	Multimeter (pH dan EC)	Crison	1
3	pH meter	Ohaus	1
4	Spektrofotometer	Cary 50	1
5	Oven	Memmert	3
6	Buret	5-25 ml/Iwaki	5
7	Buret	10-50 ml/Iwaki	5
8	Furnance	Vulcan D-550/9495131	1
9	Labu ukur	10 ml/pyrex	1
10	Labu ukur	50 ml/Iwaki	1
11	Labu ukur	100 ml/Vidtex	1

f. Uji Profisiensi

Pada tahun 2025, Laboratorium logam berat mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk periode 2025/2026 untuk komoditas tanah, tanaman, dan pupuk organik. Pelaksanaan uji

profisiensi ini merupakan bagian penting dalam upaya menilai dan memverifikasi kinerja laboratorium, khususnya terkait ketelitian, ketepatan, serta kemampuan laboratorium dalam menghasilkan data yang andal dan memenuhi persyaratan mutu. Keikutsertaan dalam uji profesiensi juga menjadi salah satu bentuk komitmen laboratorium dalam menjaga kesesuaian dengan persyaratan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 serta memastikan bahwa metode pengujian yang digunakan tetap valid dan mampu memberikan hasil yang konsisten.

Tabel 24. Komoditas Uji Profisiensi Tahun 2025

No	Objek Uji Profisiensi	Parameter Uji	
		Ruang Lingkup	Non Ruang Lingkup
1	Tanah	pH (H ₂ O dan KCl), C-Organik, N-Kedjahl	P-tersedia (Olsen/Bray), Basa-basa Tukar (K, Na, Ca, Mg), KTK, Kemasaman (Al-dd & H-dd)
2	Tanaman	N-Kedjahl, P-Total, K-Total	Ca-total, Mg-Total, Na-Total, S-Total, Fe-Total, Mn-Total, Cu-Total, Zn-Total
3	Pupuk Organik	pH (H ₂ O), C-Organik, N-Kedjahl	P-Total, K-Total, Fe-Total

g. Kaji Ulang Dokumen

Pada bulan September dan November 2025 dilaksanakan kegiatan kaji ulang dokumen sebagai bagian dari penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017. Kegiatan ini bertujuan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen seperti Panduan Mutu, Dokumen Prosedur, Instruksi Kerja Metode, Instruksi Kerja Alat, Instruksi Kerja Khusus, serta Formulir yang digunakan oleh laboratorium tetap akurat, mutakhir, konsisten, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta persyaratan standar akreditasi. Pelaksanaan kaji ulang dokumen ini juga merupakan tindak lanjut diterbitkannya sertifikat akreditasi baru dengan menggunakan nomenklatur baru yaitu BPP Lingkungan Pertanian. Perubahan nomenklatur tersebut menuntut adanya penyesuaian pada kop surat, formulir, prosedur mutu, dan dokumen resmi lainnya agar sesuai dengan identitas kelembagaan yang baru.

3.2.3 Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

Seiring transformasi organisasi menjadi BPP Lingkungan Pertanian, sistem manajemen mutu turut disesuaikan dengan perubahan struktur, fungsi, dan nomenklatur. Untuk menjamin kesesuaian dengan kondisi kelembagaan yang baru, Balai kemudian menjalani sertifikasi ulang melalui Lembaga Penilaian Kesesuaian PT Enhai Mandiri 186. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sertifikasi SNI ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Tim ISO BPP Lingkungan Pertanian

Rapat koordinasi ISO Balai yang diadakan pada 17 Juli 2025 membahas berbagai aspek penting untuk memastikan kelancaran implementasi ISO 9001:2015 di BPP Lingkungan Pertanian. Dalam rapat ini, wakil manajemen memberikan pemaparan mengenai susunan tim ISO beserta peran dan tugas masing masing.

Arahan dari Kepala Balai menegaskan pentingnya profesionalisme dan kontribusi yang membangun untuk perbaikan internal dan eksternal. Selain itu, Kepala Balai juga menyampaikan bahwa audit ISO ini bertujuan menciptakan suasana kerja yang nyaman melalui manajemen yang baik.

Pembahasan juga mencakup tindak lanjut terhadap temuan audit sebelumnya, termasuk revisi dokumen seperti proses bisnis, struktur organisasi, SOP, dan formulir. Penjadwalan agenda audit telah disusun secara rinci, dimulai dari tinjauan dokumen pada Juli, sosialisasi dokumen pada pertengahan Juli, internal audit pada Agustus, hingga pendaftaran audit di September. Rapat juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi anggota tim terkait dengan penyusunan dokumen dan teknik audit internal.



Gambar 11. Rapat Koordinasi Tim ISO BPP Lingkungan Pertanian

b. Tinjauan Dokumen

Tinjauan dokumen ISO Balai dilaksanakan pada 17-31 Juli 2025, fokus utama pembahasan mencakup peninjauan pedoman mutu ISO Balai mulai dari pasal 1 hingga 10, serta formulir yang digunakan. Dalam sesi ini, dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis, di mana beberapa tambahan, seperti program penyebaran informasi melalui perpustakaan, magang, dan pameran, telah diintegrasikan ke dalam aktivitas Balai. Selain itu, pembahasan juga mencakup sasaran mutu yang telah diperbarui berdasarkan rencana kinerja 2024 dan matriks program untuk 2025. Struktur organisasi dan deskripsi tugas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian terbaru, termasuk integrasi kegiatan terkait perubahan iklim dalam sistem GRK. Beberapa revisi dilakukan pada dokumen pendukung, seperti SOP penerimaan tamu, formulir, serta penyesuaian dokumen terkait konteks organisasi. Penyesuaian ini bertujuan memastikan konsistensi dokumen dengan standar ISO 9001:2015, termasuk penggunaan istilah dan format penulisan yang seragam. Selain itu, dilakukan penyusunan beberapa SOP baru untuk meningkatkan pelayanan BPP Lingkungan Pertanian.

Tabel 25. Daftar SOP Baru

No	Nomor SOP	Nama SOP
1	SOP-BPP LINGTAN-079	Pembentukan Tim ZI
2	SOP-BPP LINGTAN-080	Permohonan Informasi Publik
3	SOP-BPP LINGTAN-081	Pengelolaan Data dan Informasi
4	SOP-BPP LINGTAN-082	Klasifikasi dan Penyusunan DIP
5	SOP-BPP LINGTAN-083	Pengaduan Masyarakat
6	SOP-BPP LINGTAN-084	Pelaporan Gratifikasi
7	SOP-BPP LINGTAN-085	Benturan Kepentingan
8	SOP-BPP LINGTAN-086	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

c. Audit Internal

Audit internal kedua di BPP Lingkungan Pertanian berlangsung pada 20 Oktober 2025 sampai dengan 27 Oktober 2025. Audit Internal SNI ISO 9001:2015 menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu pada umumnya telah diterapkan, namun masih ditemukan beberapa temuan observasi pada aspek komunikasi internal, perencanaan, struktur organisasi, operasional, serta pelaksanaan audit internal. Observasi tersebut antara lain terkait belum optimalnya sosialisasi sasaran mutu dan prosedur kepada pelanggan internal, belum terjadwalnya survei kepuasan pelanggan internal, ketidaksinkronan sasaran mutu dengan proses bisnis dan kebijakan mutu, serta belum tersedianya persyaratan teknis terkait penyediaan produk teknologi ramah lingkungan dan model pertanian modern. Selain temuan observasi, terdapat 1 temuan ketidaksesuaian minor terkait keterlambatan pembayaran hak pegawai pada klausul kepuasan pelanggan. Ditemukan pula kelemahan dalam pelaksanaan audit internal, khususnya pada konsistensi pengisian Lembar Ketidaksesuaian, keseragaman persepsi auditor, dan kepatuhan terhadap jadwal audit. Seluruh temuan telah ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan dan berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah ditutup (*close*).

Tabel 26. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal

No	Bagian	Jenis Ketidaksesuaian	Jumlah	Status Tindakan Perbaikan
1	Manajemen Puncak	Observasi	1	Close
2	Wakil Manajemen	Observasi	1	Close
3	Tata usaha	Observasi	2	Close
		Minor	1	Close
4	Tim Kerja Program dan Evaluasi	Observasi	3	Close
5	Tim Kerja Layanan dan Pendencygunaan Hasil	Observasi	2	Close
6	Audit Internal	Observasi	3	Close

d. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen Tahun 2025 dilaksanakan pada 30 Oktober 2025, sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 di BPP Lingkungan Pertanian. Tinjauan ini mencakup evaluasi tindak

lanjut tinjauan sebelumnya, perubahan isu internal dan eksternal, serta efektivitas pengelolaan risiko dan peluang. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa sebagian besar tindak lanjut tinjauan manajemen tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik, termasuk penutupan seluruh temuan audit internal dan pemanfaatan hasil tinjauan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan sistem manajemen mutu.

Dari aspek kinerja dan keefektifan SMM, capaian kepuasan pihak berkepentingan menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 sebesar 87,11 dengan kategori mutu pelayanan “Baik”. Pencapaian sasaran mutu dan kinerja proses secara umum berjalan sesuai perencanaan, dengan realisasi anggaran dan *output* yang berada pada jalur target. Audit internal yang dilaksanakan pada Oktober 2025 menemukan sejumlah temuan berupa 1 ketidaksesuaian minor dan beberapa observasi, yang seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai (*close*). Evaluasi kinerja penyedia eksternal juga menunjukkan hasil yang memuaskan sesuai kriteria mutu, biaya, waktu, dan layanan.

Tinjauan manajemen juga menyoroti kecukupan sumber daya, di mana secara umum sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai, namun masih terdapat keterbatasan SDM seiring perubahan tugas dan fungsi akibat reorganisasi. Untuk itu, manajemen menetapkan langkah tindak lanjut melalui optimalisasi SDM yang ada, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan tugas belajar, serta penguatan layanan melalui digitalisasi dan integrasi sistem pelayanan. Selain itu, ditetapkan pula peluang peningkatan kinerja organisasi, antara lain melalui penguatan jejaring kerja sama, peningkatan adopsi produk dan layanan, serta peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan secara berkelanjutan.



Gambar 12. Rapat Tinjauan Manajemen BPRMP Lingkungan Pertanian

e. Audit Sertifikasi SNI ISO 9001:2015

Audit Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 merupakan kegiatan penilaian kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu oleh lembaga sertifikasi independen untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan telah memenuhi persyaratan standar SNI ISO 9001:2015 secara konsisten dan efektif. Audit sertifikasi ini dilaksanakan pada 19 November 2025 oleh Lembaga Sertifikasi PT Enhaii Mandiri 186. Hasil Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 mencatat 4 temuan positif dan 12 observasi, yang menunjukkan bahwa BPP Lingkungan Pertanian telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan baik serta berkomitmen terhadap peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Adapun temuan positif yang dicatat dalam audit sertifikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala BPP Lingkungan Pertanian beserta seluruh jajaran memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 secara konsisten.
2. BPP Lingkungan Pertanian dinilai sebagai unit dengan kinerja terbaik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2025 berdasarkan penilaian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Petugas PPID BPP Lingkungan Pertanian meraih predikat Petugas PPID Terbaik di lingkungan Kementerian Pertanian pada periode 2024 dan 2025.
4. Anugerah dari Kementerian Pertanian diberikan kepada BPP Lingkungan Pertanian sebagai Unit Kerja Eselon III Informatif atas komitmen dalam keterbukaan informasi publik.

Selain temuan positif, audit juga mencatat 12 observasi yang tersebar pada beberapa bagian, yaitu Top Manajemen sebanyak 5 observasi, Wakil Manajemen 4 observasi, Tim Kerja Program dan Evaluasi 1 observasi, Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil 1 observasi, serta Tata Usaha 1 observasi. Salah satu catatan penting pada Top Manajemen adalah belum dicantumkan secara jelas isu perubahan iklim dalam kajian Klausul 4.2 tentang Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan. Mengingat peran strategis BPP Lingkungan Pertanian yang erat kaitannya dengan isu lingkungan, perubahan iklim perlu dimasukkan sebagai faktor strategis yang memengaruhi kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan guna memperkuat relevansi dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu.



Gambar 13. Audit Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 BPP Lingkungan Pertanian



Gambar 14. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BPP Lingkungan Pertanian

3.2.4 Keterbukaan Informasi Publik

Pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, BPP Lingkungan Pertanian kembali meraih penghargaan sebagai Unit Kerja Eselon III dengan predikat Informatif, serta Petugas PPID Terbaik Tahun 2025. Capaian ini menegaskan konsistensi dan komitmen BPP Lingkungan Pertanian dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Prestasi ini menjadi kelanjutan dari peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2023 unit kerja ini masih

memperoleh predikat Cukup Informatif, maka pada tahun 2024 dan kembali dipertahankan pada tahun 2025, BPP Lingkungan Pertanian berhasil meraih predikat Informatif secara berkelanjutan.

Dalam proses penilaian, BPP Lingkungan Pertanian telah melalui serangkaian tahapan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh 120 Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis, meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi lapangan, serta wawancara langsung dengan Kepala Unit Kerja oleh Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas unsur Komisi Informasi Pusat, pengamat politik, akademisi, dan penggiat informasi publik. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BPP Lingkungan Pertanian dalam memberikan layanan informasi publik yang prima, responsif, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 27. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPP Lingkungan Pertanian

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara Pimpinan	Nilai Inovasi Pelayanan Informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
98	100	98,4	87,08	81,67	100	87,395	93,99



Gambar 15. Predikat Informatif dan Petugas Terbaik PPID Tahun 2025

3.2.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, BPP Lingkungan Pertanian meraih 3 (tiga) penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati yaitu :

1. Satker Terbaik Penilaian Nominal Realisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbesar
2. Satker Terbaik I Kategori Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyampaian, dan Kualitas Data Laporan Keuangan Semester I TA 2025
3. Satker Terbaik II kategori Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satker dengan Pagu Sedang

Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan *Press Release* APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Forum Konsultasi Publik (FKP), serta Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Satker yang bertempat di Aula KPPN Pati pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi terhadap kepatuhan satker dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian ini menjadi bukti komitmen BPP Lingkungan Pertanian mendukung pengelolaan keuangan negara yang bersih dan profesional. Penghargaan ini juga sebagai wujud apresiasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pembangunan ZI, dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta laporan satker lingkup KPPN Pati. KPPN Pati mengapresiasi para pengelola anggaran/APBN Satker lingkup wilayah kerja KPPN Pati yang telah melaksanakan pengelolaan APBN Semester I Tahun 2025 dengan baik, lancar dan optimal meskipun ada beberapa Satker dengan kendala masih ada pagu blokir.



Gambar 16. Penghargaan Satker Terbaik III Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I

Selain dari KPPN Pati, BPP Lingkungan Pertanian juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah yaitu Satker dengan kinerja terbaik dalam capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2025.



Gambar 16. Penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah

3.2.6 Pengelolaan PNBP BPP Lingkungan Pertanian

PNBP BPP Lingkungan Pertanian diperoleh dari hasil penerimaan umum dan fungsional. Pada tahun 2025, target penerimaan umum sebesar Rp. 7.500.000,- dan target penerimaan fungsional adalah sebesar Rp. 574.600.000,-. Realisasi penerimaan umum sebesar Rp. 54.068,- atau 720,90% yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas, gedung, lahan, pengembalian belanja pegawai tahun 2025, dan denda keterlambatan pekerjaan. Realisasi penerimaan fungsional sebesar Rp. 654.396.400,- atau 113,89% yang diperoleh dari hasil samping kebun, jasa *guest house*, layanan kunjungan agroedukasi, dan analisa laboratorium.

Tabel 28. Penerimaan PNBP BPP Lingkungan Pertanian

No	Hasil Penerimaan	Target (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Umum	7.500	54.068	720,90
2	Fungsional	574.600	654.396	113,89

3.2.7 Kegiatan *Competitive Grant* (CG) Program ICARE

a. Pemanfaatan Biokompos (Biochar-Kompos) – FABA (*Fly Ash-Bottom Ash*) untuk Konservasi Tanah dan Peningkatan Produktivitas Hasil Mangga di Kab. Pasuruan, Jawa Timur

Kegiatan Kerjasama Kemitraan Kompetitif Program ICARE (Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment) yang berjudul “Pemanfaatan Biokompos (Biochar-Kompos)–FABA (Fly Ash–Bottom Ash) untuk Konservasi Tanah dan Peningkatan Produktivitas Hasil Mangga di Kab. Pasuruan, Jawa Timur” dilaksanakan sebagai upaya inovatif untuk menjawab permasalahan penurunan kualitas lahan dan produktivitas tanaman mangga melalui pendekatan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan produk biokompos-FABA berbasis bahan lokal serta meningkatkan kapasitas petani dalam pembuatan dan pemanfaatannya.

Kab. Pasuruan dipilih menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan karena merupakan salah satu sentra produksi mangga nasional, khususnya varietas unggulan mangga Klonal 21 (Gadung 21). Seiring dengan waktu, produktivitas mangga di wilayah ini cenderung menurun akibat rendahnya kandungan bahan organik tanah, degradasi struktur tanah, ketergantungan pada pupuk kimia, serta minimnya pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan yang tersedia secara lokal. Di sisi lain, limbah industri berupa FABA dari pembangkit listrik tenaga uap memiliki potensi besar sebagai bahan pembenah tanah apabila dikelola dan dimanfaatkan sesuai standar teknis. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 meliputi koordinasi dan survei lapangan, pengumpulan dan pengolahan limbah pertanian (tongkol jagung menjadi biochar dan kotoran ternak menjadi kompos), pemanfaatan FABA dari PLTU sebagai bahan pembenah, produksi dan pengujian mutu biokompos-FABA, peningkatan kapasitas petani melalui bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Formulasi biokompos-FABA disusun dengan perbandingan biochar:FABA:kompos yaitu 1:1:8.



Gambar 17. Bimbingan Teknis "Inovasi Pertanian Ramah Lingkungan melalui Pemanfaatan Biokompos – FABA (*Fly Ash Bottom Ash*) pada Budidaya Mangga Berkelanjutan di Kab. Pasuruan"

Gambaran budidaya mangga di Desa Wonokerto dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kesiapan lokasi, petani, serta dukungan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi biokompos berbasis FABA sebagai bahan pembenah tanah yang ramah lingkungan. Pengumpulan data sekunder tersebut melibatkan 30 responden dengan aspek umur, tingkat pendidikan, pengalaman bertani mangga, dan luas lahan. Keempat aspek tersebut merupakan indikator kemampuan petani dalam mengelola kebun mangga dan melakukan adaptasi dengan teknologi baru. Mayoritas petani mangga di daerah tersebut adalah laki-laki dengan berbagai kelompok umur, rentang usia di bawah 30 tahun hingga lebih 50 tahun. Dari aspek pendidikan, sebagian besar lulusan SD sampai SMA yang memiliki kapasitas dasar untuk memahami arahan teknis seperti pelatihan praktik. Petani memiliki lahan yang cukup luas antara 0,5 ha hingga lebih dari 2 ha, dengan umur pohon mangga antara 10 tahun hingga lebih dari 20 tahun (termasuk dalam fase produktif dan berpotensi hasil tinggi dan stabil). Sekitar 70% petani menggunakan pola tanam

tumpangsari sehingga selain mangga juga diperoleh hasil tanaman lain seperti jagung atau padi.

Kondisi lahan kebun mangga memiliki jenis tanah liat, sumber perairan sumur bor, jarak tanam beragam dan dominan 8 x 8 meter. Varietas mangga yang ditanam adalah Klonal 21 atau lebih dikenal dengan mangga putar dengan sumber bibit diperoleh dari program pemerintah dan pembelian mandiri. Pengelolaan kesuburan tanah bervariasi di setiap petani yaitu dengan memberikan pupuk kimia, pupuk kandang, kompos maupun campuran, frekuensi aplikasi pupuk 70% dilakukan 1 kali setahun. Penggunaan pupuk tertinggi yang digunakan adalah pupuk kimia. Dengan bertambahnya umur tanah dan pemupukan yang telah dilakukan sebelumnya, diperlukan perlakuan atau penambahan dari bahan alami yang dapat mendukung perbaikan tanah, misalnya biokompos. Namun, sebagian besar petani mangga masih kurang informasi mengenai hal tersebut.



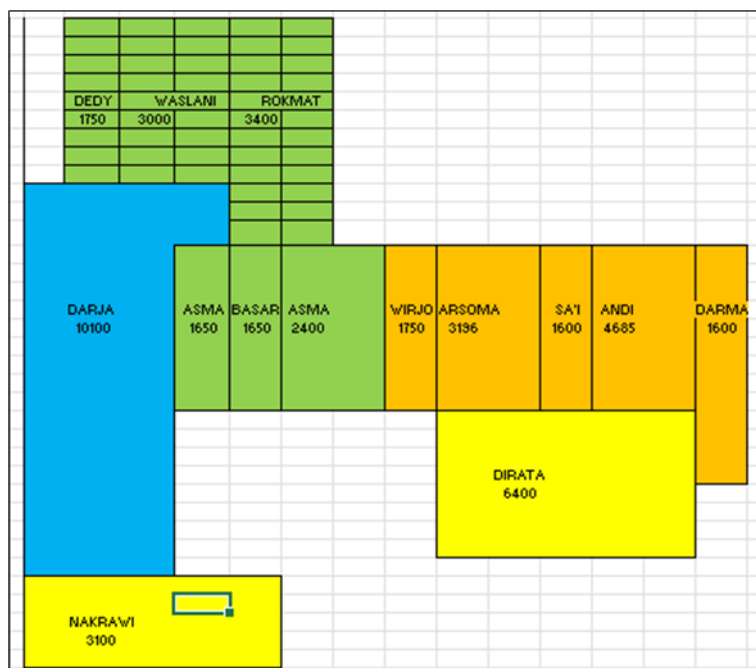
Gambar 18. Pelatihan Pembuatan Biochar dari Tongkol Jagung

Kegiatan lain yang dilakukan adalah pembuatan biochar dari tongkol jagung dengan menggunakan alat pirolisator. Pembuatan biochar diawali dengan pengumpulan limbah tongkol jagung yang dilanjutkan dengan pengeringan tongkol jagung sampai kadar air sekitar 14-16%. Kadar air tersebut ideal untuk proses pembakaran untuk menghasilkan biochar. Setelah tongkol jagung kering, proses selanjutnya adalah pembakaran tongkol jagung dengan proses yang dikenal sebagai pirolisis, yaitu proses dekomposisi bahan organik dengan pemanasan (300 - 700°C) dalam kondisi tanpa atau minim oksigen. Proses pembakaran tongkol jagung dengan menggunakan alat pirolisator kapasitas 50 kg bahan tongkol jagung membutuhkan waktu 2 jam pembakaran dengan sumber panas (gas LPG). Setelah 2 jam pembakaran, gas LPG dimatikan dan api dibiarkan membara dalam tungku pembakaran sampai dengan 10 jam. Biochar kasar dikeluarkan dari tungku pembakaran dan didinginkan dengan cara menyiram bahan tersebut dengan air. Tujuan dari penyiraman ini adalah untuk menghindari biochar kasar masih membara dan terbakar menjadi abu. Setelah biochar kasar dingin selanjutnya dihaluskan dengan mesin penepung. Bahan baku 50 kg tongkol jagung akan menjadi 15-20 kg biochar halus tergantung dari kadar air bahan tongkol jagung.

Hasil pengujian produk biokompos-FABA yang diproduksi menunjukkan bahwa FABA, baik fly ash maupun bottom ash, masuk dalam kategori grade A sebagai bahan pembenah tanah (SNI 9387:2025). Selain itu produk biokompos-FABA mempunyai pH, rasio C/N, kandungan logam Fe, Pb, dan Cd sesuai kriteria sebagai bahan pembenah tanah berdasarkan SNI 7763:2018. Biokompos-FABA ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas lahan secara menyeluruh, meningkatkan efisiensi pemupukan, serta mendukung konservasi tanah secara berkelanjutan pada budidaya jagung dan mangga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pertanian ramah lingkungan dan ekonomi sirkular, karena mengoptimalkan limbah organik dan anorganik sebagai input pertanian yang bernilai tambah.

b. Penerapan Teknologi Pengelolaan Budidaya Padi Sawah yang Ramah Lingkungan Untuk Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim di Kab. Brebes, Jawa Tengah

Kegiatan pengelolaan padi sawah yang ramah lingkungan sebagai upaya untuk beradaptasi serta melakukan upaya mitigasi perubahan iklim dilaksanakan di Desa Kalibuntu Kec. Losari Kab. Brebes. Lokasi ini merupakan hasil koordinasi dengan BPP Jawa Tengah selaku PIU ICARE Jawa Tengah. Pembagian Lokasi didasarkan pada ruang lingkup kegiatan masing masing. Survey Lokasi dan koordinasi dengan PPL Desa Kalibuntu, Kepala Desa Kalibuntu, Ketua Gapoktan Bina Sejahtera Desa Kalibuntu dan Ketua Koperasi Tumbuh Gemilang Pangan. Hasil survey diperoleh petani yang akan berkontribusi dalam kegiatan ini sebanyak 14 petani dengan luasan total 4,6 ha.



Gambar 19. Denah Lokasi Pelaksanaan Demplot Pertanian Ramah Lingkungan

Sebelum dilaksanakan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan peserta sebanyak 60 orang. Bimbingan teknis ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Brebes, Kepala Desa Kalibuntu, PPL Kec. Losari, anggota Gapoktan Bina Sejahtera, Koperasi Tani Tumbuh Gelimang Pangan (TGP) Desa Kalibuntu dan fasilitator ICARE di Kec. Losari. Materi bimbingan teknis yang diberikan antara lain biochar dan pembuatan biochar, pestisida nabati dan pembuatan pestisida nabati, *Alternate Wetting and Drying* (AWD) dan pembuatan alat pengamatan AWD, kompos dan pembuatan kompos dan penggunaan alat perangkat uji tanah sawah (PUTS).



Gambar 20. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis

Lahan yang digunakan sebagai demplot pada kegiatan ini seluas 4,628 ha. Persiapan lahan yang telah dilakukan yaitu pengolahan tanah I yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2025 dan Olah tanah kedua dilakukan sebelum tanam pada tanggal 22 Oktober 2025, dengan menggunakan traktor. Penanaman bibit padi dilakukan bertahap selama 4 hari dari tanggal 25-28 Oktober 2025, dengan rata-rata 1 varietas membutuhkan waktu tanam 1 hari. Varietas padi M70D ditanam pada lahan seluas 0,950 ha, varietas Biosalin 2 seluas 1,010 ha, varietas Inpari 32 seluas 1,385 ha dan varietas Situbondo seluas 1,283 ha. Varietas M70D, Biosalin dan Situbondo menerapkan teknologi pengelolaan padi ramah lingkungan. Sebagai pembanding terhadap penerapan teknologi ramah lingkungan dilakukan pada varietas Inpari 32 seluas 0,815 ha.

Tabel 29. Luasan Demplot Varietas Padi Rendah Emisi

No	Varietas	Luas Lahan (ha)
1	Inpari 32 (Konvensional)	0,815
2	Inpari 32	0,570
3	M70D	0,950
4	Biosalin 2	1,010
5	Situbondo	1,283



Gambar 21. Kegiatan Pengolahan, Penyemaian, dan Penanaman

Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan:

1. Pengelolaan Limbah Budidaya Padi

Kompos adalah hasil penguraian dari bahan-bahan organik oleh mikroorganisme. Kompos memiliki manfaat meningkatkan kesuburan tanah, menambah bahan organik tanah, menyediakan unsur hara untuk tanaman, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air dan meningkatkan mikroba dalam tanah. Kompos juga mengurangi limbah pertanian. Kompos yang dibuat menggunakan bahan baku limbah jerami. Pada materi bimbingan teknis yang diberikan menjelaskan mengenai cara pembuatan kompos jerami. Proses pembuatan kompos jerami dari jerami segar yang di cacah kemudian diberikan dekomposer dan difermentasi selama 4 minggu. Dekomposer yang digunakan disesuaikan dengan yang tersedia.

Pengelolaan limbah budidaya yang digunakan pada kegiatan ini yaitu kompos dan biochar. Limbah budidaya padi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan kompos yaitu jerami padi. Sedangkan limbah budidaya padi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biochar yaitu sekam padi.

Pengelolaan limbah tersebut sudah diberikan materi dan praktik pembuatannya pada pelaksanaan bimbingan teknis. Untuk mendukung pengelolaan limbah tersebut petani diberi bantuan alat pirolisis untuk pembuatan biochar dan APPO untuk pembuatan kompos.



Gambar 22. Pelatihan Pembuatan Kompos Jerami

Pendampingan pembuatan kompos jerami dilakukan setelah petani diberikan APPO yang terdiri dari alat pencacah Jerami dan alat penggiling kompos. Modifikasi juga dilakukan pada alat APPO tersebut untuk mendapat hasil cacahan yang sesuai. Pemberian bantuan alat ini diharapkan petani lebih mudah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan dapat menjadi penghasil kompos jerami yang dapat memenuhi kebutuhan dalam kelompok maupun memenuhi kebutuhan kelompok/gapoktan lain.



Gambar 23. Pendampingan Pembuatan Kompos

Biochar adalah bahan kaya karbon yang dihasilkan dari proses pembakaran pada kondisi pirolisis. Biochar memiliki banyak manfaat sebagai pembenah tanah dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Limbah budiaya padi yang dapat dimanfaatkan sebagai biochar adalah sekam padi. Sekam padi menjadi bahan baku dalam pembuatan biochar. Pembuatan biochar dengan bahan baku sekam padi

dapat dilakukand dengan dua metode yaitu pembakaran tertutup dan terbuka. Dua metode tersebut sudah diakomodir dengan pemberian alat pirolisis sejumlah 2 unit antara lain alat pirolisis dengan sistem pembakaran tertutup dan alat pirolisis dengan sistem pembakaran terbuka.



Gambar 24. Pelatihan Pembuatan Biochar

Pelatihan pembuatan biochar diberikan pada saat bimbingan teknis. Materi yang diberikan yaitu berbagai macam bahan baku pembuatan biochar, proses pembuatan biochar, dan manfaat biochar. Bahan baku biochar dapat terbuat limbah pertanian seperti tongkol jagung, sekam padi, tempurung kelapa. Pendampingan ini sebagai upaya percepatan alih teknologi penerapan budidaya padi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah pertanian.



Gambar 25. Pendampingan Pembuatan Biochar

2. Penggunaan Varietas Padi Rendah Emisi

Sawah merupakan salah satu kontributor utama GRK khususnya gas CH_4 . Varietas padi menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap besarnya emisi gas CH_4 yang dihasilkan. Penggunaan varietas padi rendah emisi menjadi salah satu alternatif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Varietas padi rendah emisi memiliki ciri ciri menghasilkan emisi gas CH_4 yang rendah, memiliki umur genjah, toleran terhadap lingkungan sub optimal seperti kekeringan atau salinitas.



Gambar 26. Kondisi Pertanaman Saat Umur 43 HST

Varietas padi yang digunakan pada penerapan demplot ramah lingkungan sebanyak 4 varietas, antara lain M70D, Situbondo, Inpari 32 dan Biosalin 2. Keempat varietas tersebut merupakan varietas yang diminati oleh petani. Varietas tersebut memiliki umur genjah, untuk M70D, Biosalin, Situbondo yaitu 70-80 HST, Inpari 32 yaitu 100 HST. Umur genjah akan mengurangi lamanya tanaman tergenang dan tanaman lebih cepat panen sehingga gas CH_4 yang diemisikan akan lebih rendah dibandingkan pada varietas yang memiliki umur panjang.

3. Penerapan Pemupukan Berimbang

Pemupukan berimbang merupakan pemberian pupuk sesuai kebutuhan tanaman, ketersediaan hara dalam tanah. Tujuan dari penerapan pemupukan berimbang adalah efisiensi dalam penggunaan pupuk, ramah lingkungan/ tidak terdapat pupuk yang terbuang, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Penerapan pemupukan berimbang penting dilakukan sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca khususnya penggunaan pupuk N berlebihan, meningkatkan efisiensi serapan pupuk oleh tanaman dan meningkatkan hasil tanaman.



Gambar 27. Pelatihan Penggunaan Alat PUTS

Pelatihan penggunaan PUTS dilakukan pada saat bimbingan teknis. Dalam bimbingan teknis tersebut dijelaskan cara penggunaan dan fungsi dari PUTS. Cara penggunaan PUTS terdapat pada buku panduan yang terdapat dalam tas PUTS. Buku panduan tersebut sudah menjelaskan mengenai cara analisa menggunakan PUTS untuk analisa parameter N, P, K, dan pH tanah. PUTS ini bermanfaat untuk mengetahui kandungan hara dalam tanah serta memberikan rekomendasi dosis pemupukan yang sesuai berdasarkan hasil analisa tanah tersebut. Pada demplot ramah lingkungan diterapkan prinsip pemupukan berimbang. Pemberian pupuk diberikan sesuai hasil dari PUTS. Sampai bulan Desember awal pemupukan sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Pemupukan untuk demplot introduksi petani diberikan sebanyak 3 kali sedangkan untuk konvensional menggunakan cara petani sebanyak 2 kali dan pemupukan konvensional diberikan dengan dosis 200 kg Urea/ha dan 300 kg Phonska/ha.

Tabel 30. Dosis Rekomendasi Pupuk Hasil Analisa Tanah dengan PUTS

Varietas	Nama	Luas (m ²)	Dosis Pupuk Rekomendasi PUTS			
			Urea	SP-36	KCL	pH
Situbondo	Pak Andi	4.685	250	50	100	6-7
	Pak Darma	1.600	250	50	100	6-7
	Pak Wirjo	1.750	250	50	100	6-7
	Pak Tarsoma	3.196	250	50	100	6-7
	Pak Sai	1.600	250	50	100	6-7
M 70	Pak Nakrawi	3.100	250	100	50	5-6
	Pak Dirata	6.400	250	100	50	5-6
Biosalin 2	Pak Darja	10.100	250	100	100	5-6
Inpari 32	Bu Asma	1.650	250	50	50	6-7
	Pak Basar	1.650	250	50	50	6-7
	BU Asma	2.400	250	50	50	6-7
Konvensional	Pak Dedi	1.750	Urea 200 kg/ha dan NPK 300 kg/ha			
	Pak Waslan	3.000	Urea 200 kg/ha dan NPK 300 kg/ha			
	Pak Rohmah	3.400	Urea 200 kg/ha dan NPK 300 kg/ha			



Gambar 28. Kegiatan Pemupukan Tanaman

4. Pengukuran Tinggi Muka Air dengan Sistem AWD Otomatis Berbasis Online

Teknik *Alternate Wetting and Drying* (AWD) adalah teknik pengairan padi sawah dengan cara mengeringkan sawah pada periode tertentu hingga surut maksimal 15 cm di bawah permukaan kemudian baru dilakukan pengairan kembali. Penerapan Teknik AWD bertujuan untuk menghemat penggunaan air, mengurangi emisi gas rumah kaca khususnya CH_4 , meningkatkan efisiensi penyerapan pupuk, dan meningkatkan produktivitas tanaman.

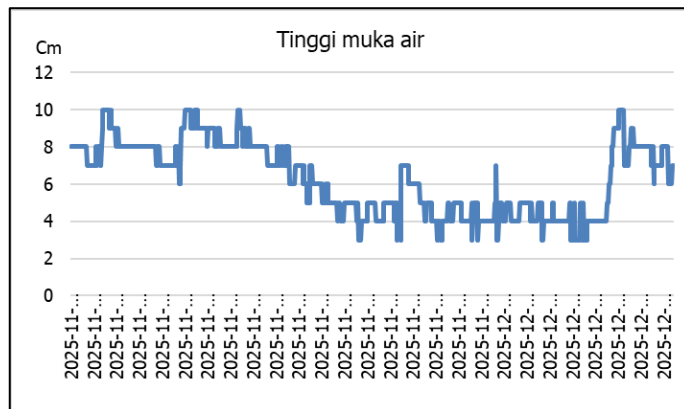
Pelatihan pembuatan alat AWD dan pengamatannya diberikan pada saat bimbingan teknis. Alat AWD yang terpasang di lahan terdapat dua jenis yaitu alat pengukuran AWD secara manual dan alat pengukuran AWD secara otomatis. Pengukuran AWD secara manual menggunakan alat *physiometer* dengan pengamatan rutin setiap hari pada pukul 07.00 WIB pagi. Titik pengamatan untuk alat AWD manual sebanyak 15 titik yang tersebar pada lahan demplot yang digunakan. Alat pengukuran AWD otomatis diberikan pada salah satu lahan petani. Alat ini menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi untuk menggerakkan sensor yang nanti akan langsung menampilkan angka tinggi air di lahan. Instalasi pembacaan tinggi air di lahan dapat langsung dipasang di rumah sehingga petani dapat langsung memantau secara harian tinggi air di sawah.



Gambar 29. Pengamatan AWD dengan Alat Pizometer

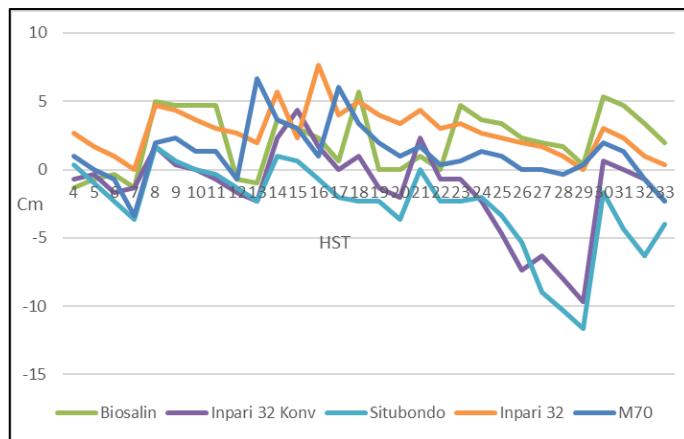


Gambar 30. Pemasangan Alat AWD Otomatis



Gambar 31. Hasil Pengamatan AWD Otomatis Pada Lahan Demplot Budidaya Padi Ramah Lingkungan di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes

Hasil pengukuran tinggi muka air dengan AWD otomatis menunjukkan bahwa kondisi lahan masih tergenang secara terus menerus, karena curah hujan yang tinggi dan lahan berada dekat aliran sungai. Pemasangan pizometer manual juga dilakukan di lahan tersebut untuk mem-validasi hasil pengukuran alat AWD otomatis (7 Desember 2025). Hasil pengukuran tinggi muka air secara manual menunjukkan bahwa pada varietas Situbondo dan Inpari 32 konvensional mengalami kondisi kering pada HST ke-24 hingga 30.



Gambar 32. Hasil Pengamatan AWD secara Manual Pada Bulan November 2025 di Lahan Demplot Budidaya Padi Ramah Lingkungan di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes

5. Pengendalian OPT secara Terpadu

Pengendalian OPT secara terpadu merupakan pendekatan dalam pengelolaan OPT yang memadukan berbagai berbagai teknik pengendalian dengan tujuan menekan perkembangan OPT tanpa merusak lingkungan. Salah satu pengendalian OPT secara terpadu yang yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penggunaan pestisida nabati secara rutin. Pestisida nabati yang digunakan merupakan salah satu teknologi dari BPP Lingkungan Pertanian. Pestisida nabati merupakan campuran dari berbagai bahan yang difermentasi kemudian diaplikasikan ke lahan. Penggunaan pestisida nabati merupakan lahan preventif yang digunakan untuk mengendalikan OPT yang menyerang tanaman.

Bimbingan teknis dalam pembuatan pestisida nabati ini menyampaikan pembuatan pestisida nabati dan cara aplikasinya. Pestisida nabati terbuat dari bahan bahan mimba, mahoni, kunyit, urin sapi, dan air. Untuk bahan mimba dan mahoni yang digunakan bagian daun tanamannya. Untuk kunyit digunakan bagian rimpangnya. Langkah dalam pembuatan pestisida nabati ini dengan menyiapkan bahan bahan yang diperlukan. Bahan daun seperti mimba dan mahoni menggunakan takaran 1 kg bahan dicampurkan dengan 2 liter air. Untuk bahan kunyit menggunakan takaran 1 kg bahan dicampurkan dengan 1 liter air. Perebusan dilakukan setiap masing masing bahan. Ekstrak bahan yang telah direbus didiamkan selama 1

semalaman. Seluruh bahan kemudian dicampurkan dan didiamkan selama 2 hari. Hasil pencampuran dapat digunakan untuk aplikasi ke lahan.



Gambar 33. Pelatihan Praktik Pembuatan Pestisida Nabati di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes

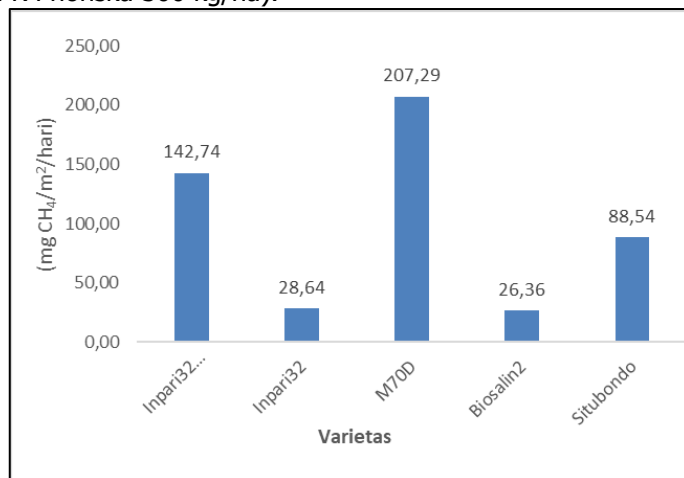
Aplikasi pestisida nabati di lahan dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan takaran 400-500 ml pestisida nabati dicampurkan dengan air sebanyak 20 liter. Aplikasi pestisida kimia digunakan sudah dilakukan satu kali karena terdapat serangan hama putih palsu dan batu lembing. Pilihan dalam penggunaan pestisida kimia karena serangan hama yang cukup banyak sehingga aplikasi pestisida kimia menjadi pilihan untuk mengurangi potensi kehilangan hasil.



Gambar 34. Aplikasi Pestisida Nabati di Lahan Demplot Budidaya Padi Ramah Lingkungan di Desa Kalibuntu, Kec Losari, Kab. Brebes

6. Pengukuran Emisi Gas CH₄

Hasil perhitungan sementara rata-rata fluks CH₄ (dari 5 kali sampling) menunjukkan bahwa penerapan varietas padi Biosalin 2 pada lahan sawah memberikan fluks CH₄ terendah dibandingkan varietas M70D, Inpari 32 (baik pada perlakuan penerapan budidaya ramah lingkungan dan konvensional) dan Situbondo. Fluks tertinggi berada di lahan dengan varietas M70D yaitu sebesar 207,29 mg CH₄/m²/hari, hal ini diduga lahan atau plot varietas M70D pada saat pengambilan sampel dalam kondisi tergenang dan dilihat dari hasil pengamatan tinggi muka air secara manual lahan tersebut tidak pernah mengalami kondisi kering, sedangkan cara konvensional memberikan fluks CH₄ tertinggi kedua yaitu sebesar 142,74 mg CH₄/m²/hari, hal ini diduga penggunaan pupuk N yang berlebih (pupuk Urea 200 kg/ha dan NPK Phonska 300 kg/ha).



Gambar 35. Rerata Fluks CH₄ Berbagai Varietas Padi Pada Penerapan Budidaya Padi Ramah Lingkungan

3.2.8 Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Pada tahun 2025, BPP Lingkungan Pertanian tidak melaksanakan kegiatan pengelolaan hibah luar negeri. Seluruh capaian kinerja unit kerja pada tahun 2025 berasal dari pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui sumber anggaran yang telah ditetapkan, tanpa adanya perencanaan, penerimaan, pengelolaan, maupun pelaporan hibah yang bersumber dari luar negeri.

PENUTUP

Laporan Kinerja RMP Lingkungan Pertanian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian Kinerja BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada tahun 2025, BPP Lingkungan Pertanian telah berhasil melaksanakan dua sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 4 (empat) IKS. Capaian IKS1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian tercapai 3,47 dari target 3,20 atau tercapai 100,44% menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKS2 Jumlah Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia tercapai 0 dari target 0 atau 0 menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKS3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian tercapai 86,10 dari target 83,35 atau tercapai 103,30% menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian IKS4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian tercapai 100,00 dari target 91,00 atau tercapai 109,89% menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil.

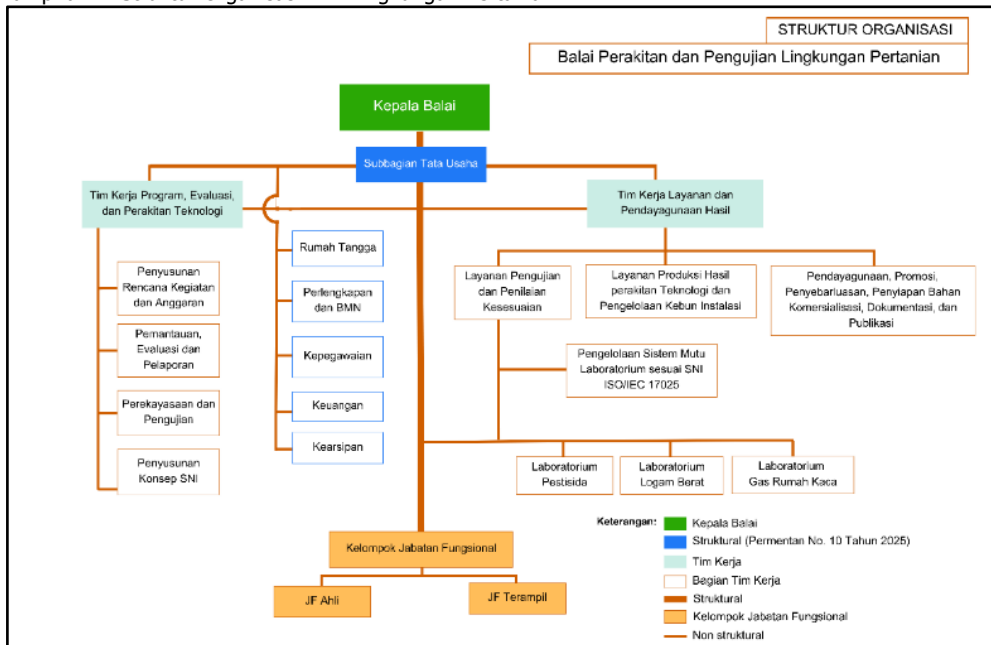
Dengan demikian, kinerja BPRMP Lingkungan Pertanian Tahun 2025 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar 104,54% menunjukkan menunjukkan capaian kinerja yang dikategorikan sangat berhasil. Capaian kinerja lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi juga telah dihasilkan BPP Lingkungan Pertanian yaitu: 1) Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian di Kab. Banjarnegara dan Kab. Cilacap, 2) Peningkatan Kualitas Laboratorium Pengujian BPP Lingkungan Pertanian, 3) Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, 4) Predikat Informatif Pada Keterbukaan Informasi Publik, 5) Sebagai Satker Terbaik Penilaian Nominal Realisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbesar, 6) Satker Terbaik I kategori Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan Semester I TA. 2025, dan 7) Satker Terbaik II Kategori Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satker dengan Pagu Sedang. Keseluruhan capaian kinerja yang telah dihasilkan BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025 menjadi bagian evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan acuan dalam perencanaan di tahun berikutnya.

Upaya peningkatan kinerja harus terus dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penetapan skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada prioritas nasional dan kebutuhan stakeholder.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi organisasi.
5. Penciptaan inovasi sistem pemerintahan berbasis elektronik/IT untuk mendukung pelaksanaan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPP Lingkungan Pertanian



Lampiran 2. Data Kepegawaian BPP Lingkungan Pertanian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
1	Dr. Ir. Lutfi Izhar, SP, M.Sc	19741128 199903 1 002	Pembina	S3	Kepala BPP Lingtan
2	Dr. Miranti Ariani, SP. M. Si	19810322 200604 2 001	Pembina/IVa	S3	ASTA Ahli Muda
3	Rina Kartikawati, SP. M. Agr	19820421 200604 2 001	Pembina/IVa	S2	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Suharsih S. Si	19720527 199803 2 001	Penata Tk. I/IIId	S1	ASTA Ahli Muda
5	Ali Pramono, SP. M. Biotech	19731025 200112 1 001	Penata Tk. I/IIId	S1	ASTA Ahli Muda
6	Eni Yulianingsih, SP. MP	19780730 200912 2 001	Penata Tk. I/IIId	S1	ASTA Ahli Muda
7	Titi Sopiawati, SP	19770808 200003 2 001	Penata Tk. I/IIId	S1	ASTA Ahli Muda
8	M. Latif Habibi, SE	19791027 200604 1 001	Penata Tk. I/IIId	S1	Ka. Subbag Tata Usaha
9	Atyk Maryati, S.T.	19850303 201101 2 020	Penata Tk. I/IIId	S1	Pengolah Data dan Informasi
10	Anik Hidayah, S. Si, M.Biotech	19840510 200912 2 004	Penata/IIIC	S2	PMHP Ahli Muda
11	Wahyu Purbalisa, SP	19790730 200912 2 002	Penata/IIIC	S2	PMHP Ahli Muda
12	Hesti Yulianingrum, SP, M.	19900713 201403 2 001	Penata/IIIC	S2	Pengolah Data dan Informasi
13	Dolty Mellyga W.P, S. Si, M.Sc	19810503 201403 2 003	Penata/IIIC	S1	Analisis PSP Ahli Pertama
14	Ukhwatul Muanisah, S.Pd	19850417 201101 2 012	Penata/IIIC	S1	Teknisi Litkayasa Penyelia
15	Baiq Nunung Sulastri, S.Si	19901115 201801 2 002	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	Pengolah Data dan Informasi
16	Ika Ferry Yudianti, SP, M.Sc	19850613 201403 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	PMHP Ahli Pertama
17	Sri Hartini	19690603 199303 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	SLTA	Teknisi Litkayasa Mahir
18	Sudarmin	19680516 199803 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	SLTA	Pengolah Data dan Informasi
19	Aprian Aji Santoso, M.P.	19910401 201902 1 003	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	POPT Ahli Pertama
20	Siska Apriyani, M.Ling.	19860409 201902 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	PMHP Ahli Pertama
21	Suryanto, SST	19771110 200701 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	D4	Teknisi Litkayasa Mahir
22	Yono, SST	19800213 200710 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	D4	Teknisi Litkayasa Mahir
23	Edi Suprptomo, SST	19801220 200812 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	D4	Teknisi Litkayasa Mahir
24	Ina Zulaehah, SP	19820412 201503 2 004	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	PMHP Ahli Pertama
25	Ria Fauriah M, SP	19921227 201503 2 002	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	PMHP Ahli Pertama
26	Jumari	19690504 200701 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	SLTA	Teknisi Litkayasa Mahir
27	Apit Mulyana, S.Pt	19950421 202203 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	ASTA Ahli Pertama
28	Afrida Fatkhiatul M., S.Pt, M.Si	19880314 202203 2 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	ASTA Ahli Pertama
29	Likco Desvian Herindra, A.Md	19881207 201101 1 003	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	Pengolah Data dan Informasi
30	Slamet Rianto	19770626 200710 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	SLTA	Teknisi Litkayasa Mahir
31	Fitra Purnariyanto, AMD. A.K	19810801 200604 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIB	D3	Teknisi Litkayasa Mahir
32	Marta Sumarno, A.Md	19840306 200901 1 005	Penata Muda Tk.I/IIIB	D3	Paramedik Karantina Hewan Mahir
33	Elga Riesta Puteri, S.Si, M.Sc	19950801 201801 2 002	Penata Muda Tk.I/IIIB	S2	Analisis PSP Ahli Pertama

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
34	Angga Nurkholis, SE	19890420 202012 1 003	Penata Muda Tk.I/IIb	S1	Penelaah Teknis Kebijakan
35	Sarah, SP	19921003 201801 2 002	Penata Muda /IIIa	S1	PMHP Ahli Pertama
36	Purwanto	19751229 200701 1 001	Penata Muda /IIIa	SLTA	Pengolah Data dan Informasi
37	Suryani	19731002 200701 1 001	Penata Muda /IIIa	SLTA	Pengolah Data dan Informasi
38	Supraptiningsih	19790112 200701 2 001	Penata Muda /IIIa	SLTA	Pengadministrasi Perkantoran
39	Sukur Basuki	19790511 200701 1 001	Penata Muda /IIIa	SLTA	Pengolah Data dan Informasi
40	Duri	19720515 200604 1 002	Penata Muda /IIIa	SLTA	Operator Laboratorium
41	Aji Ispatrika, A.Md.	19930524 201902 1 001	Pengatur TK.I/IIId	D3	Operator Laboratorium
42	Sri Iestari, A.Md	19921009 201902 2 001	Pengatur TK.I/IIId	D3	Paramedik Karantina Hewan Terampil
43	Guntur Shahid, A.Md	19930902 201902 1 001	Pengatur TK.I/IIId	D3	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil
44	Mayang Fikra, A.Md.	19950429 201902 2 003	Pengatur TK.I/IIId	D3	Teknisi Litkayasa Terampil
45	Suyoto	19730107 199903 1 002	Pengatur TK.I/IIId	SLTA	Pengadministrasi Perkantoran
46	Jarmin	19730112 199903 1 001	Pengatur TK.I/IIId	SLTA	Pengadministrasi Perkantoran
47	Debby Oktaviani	19931017 201503 2 001	Pengatur TK.I/IIId	SLTA	Teknisi Litkayasa Terampil
48	Putri Yunita Lutfiani, A.Md	19970622 202203 2 001	Pengatur/ IIC	D3	Penelaah Teknis Kebijakan
49	Purwono	19841009 200710 1 001	Pengatur/ IIC	SLTA	Operator Layanan Operasional
50	Wasidin	19671231 201212 1 014	Juru/Id	SD	Operator Layanan Operasional
51	Isna Eviliana, S.Hum	19930522 202321 2 037	IX	S1	Pustakawan Ahli Pertama
52	Rauhati Noor Maulida, S.E.	19960716 202505 2 004	Pengatur TK.I/IIId	S1	Calon Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
53	Sofa Zuhad Mudawam, S.E.	19971107 202501 1 005	Pengatur TK.I/IIId	S1	Calon ASTA Ahli Pertama
54	Shinta Novi Mestika Ratri, S.P.	20011106 202505 2 004	Pengatur TK.I/IIId	S1	Calon PMHP Ahli Pertama
55	Jasmani	-	-	SD	-
56	Jumari	19860704 202521 1 113		SLTA	Operator Layanan Operasional
57	Kundono	19840826 202521 1 051		SMA	Operator Layanan Operasional
58	Ariswandi	19850926 202521 1 049		SMA	Operator Layanan Operasional
59	Susanto	19860610 202521 1 104		SMA	Operator Layanan Operasional
60	Suwardi	19810714 202521 1061		SMK	Operator Layanan Operasional
61	Eko Sumardiyanto	19890830 202521 1069		SMA	Operator Layanan Operasional
62	Sunik	19820126 202521 2 033		SMK	Operator Layanan Operasional
63	Gunarso	19681110 202521 1 016		SMA	Operator Layanan Operasional
64	Hilda Amalia Rahmawati	19900123 202521 2 049		S1	Penata Layanan Operasional
65	Ginah	19740419 202521 2 023		SMA	Operator Layanan Operasional
66	Rakhmah Setianingrum	19831013 202521 2 034		S1	Penata Layanan Operasional
67	Zainal Hendro Nugroho	19840411 202521 1 080		S1	Penata Layanan Operasional

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	PENDIDIKAN	NAMA JABATAN
68	Didik Sulistiyono	19861229 202521 1 049		SLTA	Operator Layanan Operasional
69	Winarti	19871007 202521 2 077		SMA	Operator Layanan Operasional
70	Siswanto	19790614 202521 1 051		SMK	Operator Layanan Operasional
71	Riyanto	19960719 202521 1 054		S1	Penata Layanan Operasional
72	Sari Poncowati	19810118 202521 2 013		SMK	Operator Layanan Operasional
73	Dadang Listitiyanto	19760430 202521 1 020		SLTA	Operator Layanan Operasional
74	Edi Susilo	19950702 202521 1 060		SMA	Operator Layanan Operasional
75	M. Andi Setyanto	19891211 202521 1 110		SMA	Operator Layanan Operasional

Lampiran 3. PK BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025 Awal

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182 TELEPON 0295 4749044 FAKSIMILI 0295 4749045 WEBSITE: lingkungan.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.lingkungan@pertanian.go.id	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025		
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :		
Nama : Agus Hasbianto Jabatan : Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.		
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.		
Pihak Kedua	Jakarta, 30 Desember 2024 Pihak Pertama	
 Fadry Djufry	 Agus Hasbianto	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	- Standar
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	83,35 (Nilai ZI)
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standarisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	87 (Nilai SMART)

KEGIATAN

Balai Pengujian Standar Instrumen
Lingkungan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 8.001.025.000,-

Kepala Badan Standardisasi
Instrumen Pertanian


Fadry Djufry

Jakarta, 30 Desember 2024
Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Lingkungan Pertanian


Agus Hasbianto



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182
TELEPON (0295) 4749044 FAKSIMILI (0295) 4749045
WEBSITE: lingkungan.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Izhar
Jabatan : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 19 Mei 2025
Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Lutfi Izhar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas produk Sumberdaya Lahan Pertanian	Jumlah Pengujian Mutu Lingkungan Pertanian Modern	Jumlah Pengujian	730
		Jumlah Konsep SNI Lingkungan Pertanian yang disusun	RSNI	-
		Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian	Indeks	3,2
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Nilai	83,35
3	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Nilai	87

KEGIATAN

ANGGARAN

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Rp. 8.911.025.000,-

Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

Jakarta, 19 Mei 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Lingkungan Pertanian


Fadry Djufry


Lutfi Izhar



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182
TELEPON (0295) 4749044 FAKSIMILI (0295) 4749045
WEBSITE: lingkungan.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Izhar
Jabatan : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 31 Desember 2025
Pihak Pertama

Fadry Djufry

Lutfi Izhar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Lingkungan Pertanian	3,2	Indeks
2	Tersedianya Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2.1. Jumlah Teknologi Digital, <i>Smart Farming</i> dan Modern Lingkungan Pertanian yang Tersedia	-	Teknologi
LAINNYA				
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	83,35	Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	91,00	Nilai

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	419.458.000,-
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp.	419.458.000,-
HA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	
WA	Dukungan Manajemen	Rp.	8.169.556.000,-
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	8.169.556.000,-
		Rp.	8.589.014.000,-

Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian


Fadry Djufry

Jakarta, 31 Desember 2025
Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Lingkungan Pertanian


Lutfi Izhar

Lampiran 6. Manual IKU BPP Lingkungan Pertanian Tahun 2025

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN TA 2026

Sasaran dan Indikator Kinerja:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian	Indeks kepuasan layanan pengujian lingkungan pertanian	Indeks	3,23
2	Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian	Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern lingkungan pertanian yang tersedia	Produk	1
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian	Nilai	86,10
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian	Nilai	97,75

1. Manual Indikator 1 :

Program	HA – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 - Meningkatkan kepuasan pelayanan pengujian sumberdaya lahan pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui peningkatan kepuasan layanan pengujian sumberdaya lahan pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan layanan pengujian lingkungan pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa layanan pengujian lingkungan pertanian terhadap kualitas layanan pengujian yang diberikan Formula : Instrumen pengukuran IKM yang disusun dari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Skala Likert 1-4 Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pengujian lingkungan pertanian yang dilakukan di Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian
Satuan	Indeks
Target	2025: 3,20 2026: 3,23 2027: 3,24 2028: 3,25 2029: 3,26
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High

Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact														
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading														
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)														
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize														
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian														
Sumber Data	Data Primer														
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir														
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan														
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah sampel uji menurun</td> <td>Temu teknis pelanggan secara berkala untuk penderasan promosi</td> </tr> <tr> <td>Jumlah hasil pertanian menurun</td> <td>Penguatan kapasitas SDM Pengelola IP2MP</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Jumlah sampel uji menurun	Temu teknis pelanggan secara berkala untuk penderasan promosi	Jumlah hasil pertanian menurun	Penguatan kapasitas SDM Pengelola IP2MP								
Potensi Risiko	Mitigasi														
Jumlah sampel uji menurun	Temu teknis pelanggan secara berkala untuk penderasan promosi														
Jumlah hasil pertanian menurun	Penguatan kapasitas SDM Pengelola IP2MP														
Catatan															

2. Manual Indikator 2 :

Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK.2 - Tersedianya teknologi sumberdaya lahan pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani / organisasi petani / pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif luas dan berkelanjutan dalam usaha taninya
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah teknologi digital, smart farming, dan modern lingkungan pertanian yang tersedia
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur ketersediaan dan kesiapan adopsi berbagai inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian Formula : Perhitungan Jumlah teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang dihasilkan oleh Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian Tujuan : mencatat sejauh mana teknologi digital, smart farming dan modern telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan pertanian
Satuan	Produk
Target	2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks pemanfaatan teknologi pertanian
Jenis Aspek Target	☒ Kuantitas/ Output ☐ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)													
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize													
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian													
Sumber Data	Data Primer													
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir													
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☒ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan													
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks pemanfaatan teknologi oleh pengguna menurun</td> <td>Peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendayagunaan hasil perakitan teknologi kepada pengguna</td> </tr> <tr> <td>Terjadinya perubahan iklim</td> <td>Membuat kebijakan untuk mendukung teknologi yang selaras dengan perubahan iklim</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Indeks pemanfaatan teknologi oleh pengguna menurun	Peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendayagunaan hasil perakitan teknologi kepada pengguna	Terjadinya perubahan iklim	Membuat kebijakan untuk mendukung teknologi yang selaras dengan perubahan iklim						
Potensi Risiko	Mitigasi													
Indeks pemanfaatan teknologi oleh pengguna menurun	Peningkatan frekuensi sosialisasi dan pendayagunaan hasil perakitan teknologi kepada pengguna													
Terjadinya perubahan iklim	Membuat kebijakan untuk mendukung teknologi yang selaras dengan perubahan iklim													
Catatan														

3. Manual Indikator 3 :

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.3 – Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.4 – Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK / WBBM pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan <i>check list</i> penilaian WBK / WBBM Formula : Instrumen pengukuran nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan <i>check list</i> penilaian WBK / WBBM Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai dasar mewujudkan reformasi birokrasi
Satuan	Nilai
Target	2025: 83,85 2026: 86,10 2027: 86,50 2028: 87,00 2029: 87,50
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya

Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High												
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact												
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading												
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)												
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize												
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian												
Sumber Data	Data Primer												
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir												
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan												
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai akhir pembangunan ZI tidak mencapai target</td> <td>Mengumpulkan dokumen secara sistematis dan terkendali</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Potensi Risiko	Mitigasi	Nilai akhir pembangunan ZI tidak mencapai target	Mengumpulkan dokumen secara sistematis dan terkendali								
Potensi Risiko	Mitigasi												
Nilai akhir pembangunan ZI tidak mencapai target	Mengumpulkan dokumen secara sistematis dan terkendali												
Catatan													

4. Manual Indikator 4 :

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.4 – Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.5 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan negara di Balai Perakitan dan Pengujian lingkungan pertanian
	Formula : Instrumen pengukuran nilai IKPA berdasarkan beberapa aspek seperti Realisasi Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan, Penyampaian LPJ, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, serta Capaian Output.
	Tujuan : Mendapatkan Gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan seberapa tertib, efisien, efektif, dan akuntabel suatu satuan kerja dalam mengelola keuangan
Satuan	Nilai
Target	2025: 91 2026: 97.75 2027: 98.00 2028: 98.25 2029: 98.50
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High

Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact													
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading													
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)													
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize													
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian													
Sumber Data	Data Primer													
Jenis Perhitungan Data	☒ Akumulasi ☐ Rata – rata ☐ Nilai Posisi Akhir													
Periode Pelaporan	☒ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☐ Tahunan													
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realisasi bulanan tidak sesuai dengan RPD sebagaimana halaman III DIPA sehingga deviasi melebihi 5%, oleh karena itu IKPA menjadi tidak maksimal</td> <td>Melakukan pemantauan terkait realisasi anggaran dan capaian output setiap bulannya</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Realisasi bulanan tidak sesuai dengan RPD sebagaimana halaman III DIPA sehingga deviasi melebihi 5%, oleh karena itu IKPA menjadi tidak maksimal	Melakukan pemantauan terkait realisasi anggaran dan capaian output setiap bulannya								
Potensi Risiko	Mitigasi													
Realisasi bulanan tidak sesuai dengan RPD sebagaimana halaman III DIPA sehingga deviasi melebihi 5%, oleh karena itu IKPA menjadi tidak maksimal	Melakukan pemantauan terkait realisasi anggaran dan capaian output setiap bulannya													
Catatan														

Lampiran 7. Rencana Aksi Tahun 2025

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN									
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN (SS/SP/PSK)	KODE	IKSS / IKSP/RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
						TW1	TW2	TW3	TW4
SS02	Komoditas Pertanian Yang Semilai Tambah dan Bertaya Saing	IKSS0202	02 - Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	100,00	%				
SP01	Meningkatnya sertifikasi Usahatani Nasional	IKSP0101	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi	100,00	%	0	10	70	100
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Persentase produk sumberdaya lahan yang tersertifikasi (%)	48.466.000	100	%	0	10	70
		7911.CAG.104.051.A	Sarana Laboratorium SDLP Modern	48.465.000	2	Unit	0	10	70
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu tanah dan pupuk modern (Jumlah Pengujian)	1.762.139.000	3527	Produk	19	36,00	64,00
		7911.BJA.107.051.A	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Tanah, Air, Tanaman, Penbenihan Tanah dan Pupuk Terstandar	1.599.624.000	3522	Produk	31	63	86
		7911.BJA.107.051.B	Penyelenggaraan Uji Profesiensi Laboratorium	48.515.000	3	Produk	0	0	30
		7911.BJA.107.051.C	Pengelolaan IP2SP	114.000.000	2	Produk	25	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Jumlah konsep SNI tanah dan pupuk yang disusun (Jumlah RSM)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian tanah dan pupuk (Indeks)		3,2	Indeks	25	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu lingkungan pertanian modern (Jumlah Pengujian)	506.275.000	730	Produk	15	50	75
		8916.BJA.107.052.A	Pengelolaan IP2SP	82.198.000	2	Produk	15	50	75
		8916.BJA.107.052.B	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Lingkungan Pertanian	424.077.000	728	Produk	15	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Jumlah konsep SNI lingkungan pertanian yang disusun (Jumlah RSM)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian lingkungan pertanian (Indeks)		3,2	Indeks	25	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu pertanian lahan rawa modern (Jumlah Pengujian)	127.632.000	415	Produk	15	50	75
		7911.BJA.107.051.A	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Pertanian Lahan Rawa	100.000.000	410	Produk	15	50	75
		7911.BJA.107.051.B	Pengelolaan IP2SP	27.632.000	5	Produk	15	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Jumlah konsep SNI sumberdaya lahan pertanian yang disusun (Jumlah RSM)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian sumberdaya lahan pertanian (Indeks)		3,2	Indeks	25	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu sumberdaya lahan pertanian modern (Jumlah Pengujian)	16.571	2	Unit	15	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Pengadaan Alat Laboratorium	10.571	2	Unit	15	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Jumlah konsep SNI sumberdaya lahan pertanian yang disusun (Jumlah RSM)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian sumberdaya lahan pertanian (Indeks)						
SS01	Komoditas Pertanian yang Tersedia	IKSS0106	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian		90,56	%			
SP02	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyipaan PSP, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	IKSP0202	Persentase pelaku usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyipaan PSP, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan		20,33	%	0	0	50
SS04	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IKSS0401	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian		80,20	%			
SP03	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	IKSP0303	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		78,51	%	0	0	50
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian									
SK03	Tereujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBMM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya lahan pertanian (Nilai)	12.309.339.900	83,35	Nilai	25	50	75
		8918.AEA.101.251.A	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.135.000.000	1	Kegiatan	20	50	75
		8918.EBA.958.251.A	Layanan BDR	10.000.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.958.251.A	Layanan Humas	80.000.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.958.251.B	Pengelolaan Informasi Publik	14.000.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.962.251.E	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kemampuan SDM	84.000.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.962.251.F	Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan dan Kerumahainggaan	120.500.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.964.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.818.219.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.964.002.A	Kebudayaan Sehat-Hati Pemasokan	2.424.794.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.964.002.B	Layanan Daya dan Jasa	1.447.200.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.964.002.C	Pemeliharaan Kantor	2.483.586.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.964.002.D	Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	635.540.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.963.251.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	64.500.000	1	Layanan	20	50	75
		8918.EBA.963.251.B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko	12.000.000	1	Layanan	20	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk									
SK03	Tereujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBMM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (Nilai)	10.909.127.999	83,35	Nilai	25	50	75
		8918.AEA.101.251.A	Pendampingan Standar Pengelolaan Tanah dan Hara Mendukung Swasembada Pangan	835.000.000	1	Kegiatan	25	50	75
		8918.EBA.958.251.A	Sistem Akuntabilitas Pemenuhan GABAS/IMAK/BN	10.000.000	1	Layanan	25	50	75
		8918.EBA.958.251.A	Pengelolaan Informasi Publik	15.000.000	1	Layanan	25	50	75
		8918.EBA.958.251.B	Pelayanan Hubungan Masyarakat	15.000.000	1	Layanan	25	50	75
		8918.EBA.962.251.F	Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu	38.000.000	1	Layanan	25	50	75

		9918.EBA.962.051.O	Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Satker	55.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.531.327.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1.871.420.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	448.440.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan perkantoran	1.835.570.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	226.370.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.963.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.963.051.B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	13.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
24	Balai Perakitan dan Penguji Lingkungan Pertanian									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBKM pada Balai Perakitan dan Penguji Lingkungan Pertanian (Nilai)	8.100.356.000	83,35	Nilai	25	50	75	100
		9918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	910.000.000	1	Kegiatan	25	50	75	100
		9918.EBA.998.051.A	Operasional Pengelolaan Barang Milik Negara	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.998.051.A	Layanan Hubungan Masyarakat	26.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.998.051.B	Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	29.500.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.D	Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan	70.500.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.H	Sinkronisasi kegiatan dan Koordinasi Informasi Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.796.028.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	976.925.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	402.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan perkantoran	1.215.284.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	616.316.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.963.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	21.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.963.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	8.800.000	1	Layanan	25	50	75	100
27	Balai Perakitan dan Penguji Pertanian Lahan Rawa									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBKM pada Balai Perakitan dan Penguji Pertanian Lahan Rawa (Nilai)	7.495.539.000	83,35	Nilai	25	50	75	100
		9918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	835.000.000	1	Kegiatan	25	50	75	100
		9918.EBA.998.051.A	Operasional Pengelolaan Barang Milik Negara	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.962.051.B	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	15.000.000	1	Dokumen	25	50	75	100
		9918.EBD.962.051.C	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	15.000.000	1	Dokumen	25	50	75	100
		9918.EBD.962.051.D	Pengelolaan Informasi Publik	25.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.962.051.E	Pengelolaan Hubungan Masyarakat	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.962.051.F	Pengelolaan Kepegawaian	30.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.962.051.G	Sinkronisasi kegiatan dan Koordinasi Informasi Standardisasi Instrumen Pertanian	35.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.001.A	Gaji dan Tunjangan	3.014.379.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1.596.140.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	308.985.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan perkantoran	1.058.153.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	444.882.000	1	Layanan	25	50	75	100
18	Balai Perakitan dan Penguji Agroiklimat dan Hidrologi Pertanian									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBKM pada Balai Perakitan dan Penguji Agroiklimat dan Hidrologi Pertanian (Nilai)	7.394.484.000	81,21	Nilai	25	50	75	100
		9918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.035.000.000	1	Kegiatan	25	50	75	100
		9918.EBA.998.052.A	Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Agroklimat	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.998.051.A	Pelayanan Humas	25.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.998.051.B	Pengelolaan Informasi Publik	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.F	Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Satker dan Rumah Tangga	51.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.G	Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu	22.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.827.284.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1.332.950.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	465.720.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor	1.113.725.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.994.002.D	Operasional Satker	467.195.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.963.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	25.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBD.963.051.B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
SS04	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IKSP0402	Nilai IKPA Kementerian Pertanian			92,74	Nilai			
SP04	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	IKSP0404	Nilai IKPA Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			85,00	Nilai			
14	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian (Nilai)	143.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	77.500.000	1	Layanan	20	50	75	100
		9918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan dan SAP	67.500.000	1	Layanan	20	50	75	100
15	Balai Perakitan dan Penguji Tanah dan Pupuk									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Penguji Tanah dan Pupuk (Nilai)	43.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	28.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan	21.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
16	Balai Perakitan dan Penguji Lingkungan Pertanian									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Penguji Lingkungan Pertanian (Nilai)	29.200.000	87	Nilai	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	22.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.E	Operasional Pengelolaan Keuangan	7.200.000	1	Layanan	25	50	75	100
17	Balai Perakitan dan Penguji Pertanian Lahan Rawa									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Penguji Pertanian Lahan Rawa (Nilai)	65.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	35.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan	30.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
18	Balai Perakitan dan Penguji Agroiklimat dan Hidrologi Pertanian									
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IK04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Penguji Agroiklimat dan Hidrologi Pertanian (Nilai)	57.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	35.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		9918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan dan Penfengkapan	22.000.000	1	Layanan	25	50	75	100

Lampiran 8. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
JALAN RAYA JAKENAN - JAKEN KM.05, KOTAK POS 05 JAKENAN, PATI 59182
TELEPON (0295) 4749044 FAKSIMILI (0295) 4749045
WEBSITE: lingkungan.bmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
Nomor : B-869/OT.210/H.10.3/06/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM LAPORAN KINERJA (LAKIN)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk Tim Laporan Kinerja;
- b. Bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang No.20 tahun 2023 tanggal 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden RI No.12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden RI No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 tahun 2022

183

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
Nomor : B-869/OT.210/H.10.3/06/2025
Tanggal : 2 Juni 2025

TIM LAPORAN KINERJA (LAKIN)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

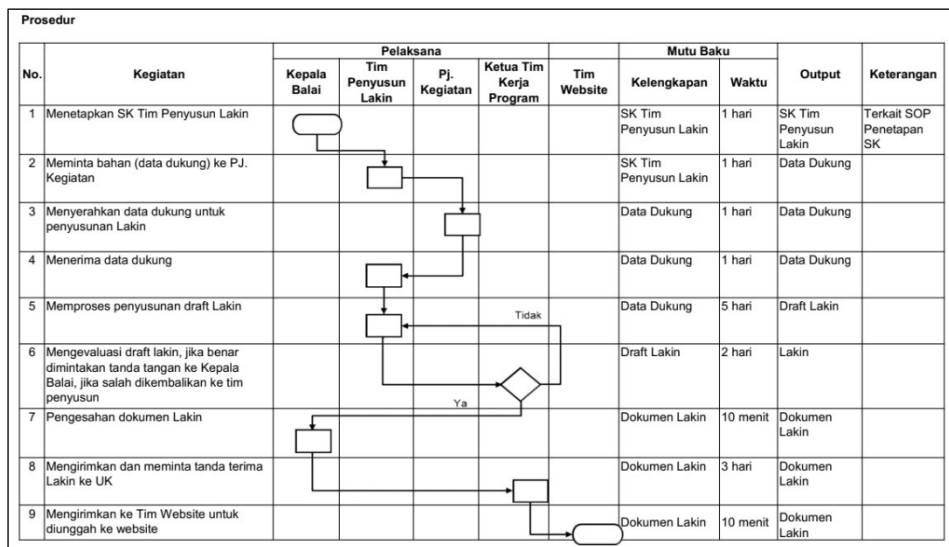
No.	Nama/NIP	Jabatan	Tugas
1.	Dr. Lutfi Izhar, S.P.,M.Sc NIP. 197411281999031002	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dr. Miranti Ariani, S.P., M.Si. NIP. 198103222006042001	Ketua Tim Kerja Program	Ketua
3.	Siska Apriyani, M.Ling NIP. 198604092019022001	Ketua Tim Kerja Layanan	Sekretaris
4.	M.Latif Habibi, SE. NIP. 197910272006041001	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
7.	Atyk Maryati,ST NIP.198503032011012020	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8.	Angga Nurkholis, SE NIP. 198904202020121003	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6.	Baiq Nunung Sulastri, S.Si NIP.19901115 201801 2 002	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Ika Ferry Yuniarti, SP, M.Sc NIP. 198506132014032001	PMHP Ahli Pertama	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran

LUTFI IZHAR
NIP. 197411281999031002

Lampiran 9. SOP Penyusunan Laporan Kinerja BPP Lingkungan Pertanian

 KEMENTERIAN PERTANIAN RI	Nomor SOP	SOP-BRMP LINGTAN-062	
	Tanggal Pembuatan	17 Juli 2025	
	Tanggal Revisi	-	
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Disahkan oleh	Kepala Balai	
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN	 Dr. Laili Lhar, S.P., M.Sc. 197411281999031002		
Nama SOP		PENYUSUNAN LAKIN	
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah			Pelaksana : 1. Kepala Balai 2. Ketua Tim Kerja Program 3. P.J. Kegiatan 4. Tim Penyusun Lakin 5. Tim Website
Keterkaitan : - SOP Surat keluar		Peralatan/perlengkapan : 1. DIPA 2. RKAKL 3. RAB 4. Proposal 5. Komputer 6. Printer 7. Data dukung	
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka LAKIN tidak tersusun		Pencatatan dan pendataan :	



Lampiran 10. Nilai IKPA BPP Lingkungan Pertanian per 31 Desember 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sather	Uraian Sather	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	050	018	450856	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				
2	139	018	633961	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				
3	097	018	237380	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN LINGKUNGAN PERTANIAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				
4	032	018	411993	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACAING	Nilai	100.00	100.00	99.88	0.00	0.00	100.00	100.00	79.98	80%	0.00	99.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.98	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			99.94			100.00				
5	023	018	025227	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.31	100.00	79.83	80%	0.00	99.79
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			99.16			100.00				

hal : 1 dari 11 halaman

tanggal cetak : 06-01-26 23:18:49 oleh : E01809



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM

TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204

WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	<u>Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian</u>	<u>86,10</u>
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimate dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE : <https://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR: 5530/Kpts./HM.130/A/12/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI

PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan informasi publik yang lengkap dan mudah diakses oleh publik merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan standar pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian perlu dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut hasil penyelenggaraan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025;

11	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	XI
12	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung	XII
13	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	XIII
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	XIV
15	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	XV
16	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	XVI
17	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	XVII
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	XVIII
19	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	XIX
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	XX
21	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	XXI
22	Balai Embrio Ternak	XXII
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	XXIII
24	Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan Pontianak	XXIV
25	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	XXV
26	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	XXVI
27	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	XXVII
28	Balai Veteriner Bukittinggi	XXVIII
29	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	XXIX



BRMP

LINGKUNGAN PERTANIAN



(0295) 4749045



(0295) 4749044



082136065354



brmp.lingkungan@pertanian.go.id



Jl. Raya Jakenan-Jaken KM 05 No. 1, Pati, Jawa Tengah

